

BAB III

Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Kulon Progo Pada Masa Kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo

A. Keberhasilan Kebijakan

Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan langsung dilapangan dengan beberapa narasumber. Analisis data dilakukan dengan memaparkan seluruh hasil penelitian selama dilapangan dengan menggunakan indikator yang digunakan untuk mengetahui faktor dari keberhasilan kebijakan ketahanan pangan pada masa kepemimpinan Hasto Wardoyo. Adapun beberapa hal yang akan dibahas yaitu : pertama, pada sisi kebijakan ketahanan pangan fokus kebijakan/programnya : Ketersediaan pangan, Akses pangan, Penyerapan pangan, Stabilitas pangan, Status gizi masyarakat. Kedua, pada sisi implemementasi kebijakan publik fokus pada penyelenggara (pemerintah) : Komunikasi (strategi), Sumber daya, Sikap birokrasi atau pelaksana (komitmen) dan Struktur organisasi.

Data yang di peroleh dari penelitian yang berupa wawancara, dokumentasi, observasi dan kajian pustaka. Selanjutnya akan di analisis dengan kualitatif.

Analisis dimulai dengan melihat seberapa pentingnya Ketahanan pangan bagi pemerintah Kulon Progo untuk kesehjateraan Masyarakat Kulon Progo sendiri, selanjutnya membahas kebijakan Ketahanan Pangan dari

pemerintah Kulon Progo, membahas mengenai kondisi ketahanan pangan sekarang sekaligus beberapa kebijakan atau program inovasi di masa Kepemimpinan Bapak Hasto Wardoyo dan terakhir menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan ketahanan pangan Kabupaten Kulon Progo pada masa pemerintahan Bapak Bupati Hasto Wardoyo serta, juga berkaitan dengan kontribusi ketahanan pangan dan diakhiri dengan Tanggapan masyarakat Kabupaten Kulon Progo terkait dengan Kebijakan dan Program pangan.

1. Arti Penting Ketahanan Pangan Di Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo ternyata memang sangat fokus terhadap ketahanan pangan nya karena Pangan merupakan hal yang paling penting dalam perekonomian Kabupaten Kulon Progo dengan alasan : Pangan tidak bisa digantikan, masih ada desa rawan pangan, kemiskinan + Jumlah penduduk naik, Jumlah petani dan kapasitas produksi terancam turun dan ancaman globalisasi & konversi bahan pangan untuk energi. Sebenarnya, Kabupaten Kulon Progo tidak lagi fokus pada Ketahanan Pangan tetapi Kemandirian Pangan. Jadi, pada masa Pemerintahan Hasto Wardoyo ini Kabupaten Kulon Progo ingin menjadi Kabupaten yang mandiri pangan dalam arti menyediakan pangan dari masyarakat untuk masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan Kemandirian Pangan yaitu dengan adanya Kebijakan dan Program Kebijakan Kemandirian Pangan yang sudah terimplementasi sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan dan rawan pangan di Kabupaten Kulon Progo ini.

Ketahanan pangan berasal dari kebijakan Pemerintah Pusat yang kemudian setiap daerah harus melaksanakan kebijakan tersebut dalam meningkatkan pangan nya dengan inovasi-inovasi kebijakan dan programnya masing-masing untuk memajukan ekonomi dan mensejahterakan masyarakatnya.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Sebetulnya kebijakan ketahanan pangan itu kan di pusat sudah ada ya, kita di daerah hanya bervariasi melaksanakan kebijakan pusat terus di daerah juga harus punya ide ide lain.”¹

Kabupaten Kulon Progo sebelum masa pemerintahan Bapak Hasto Wardoyo memang sudah menjalankan program pangan tetapi masih fokus pada ketahanan pangan saja dan waktu itu salah satu penyebab turunnya produksi ketahanan pangan karena terjadi erupsi merapi pada tahun 2010. Ketika, memasuki masa pemerintahan Bapak Hasto Wardoyo, Pemerintah tidak hanya fokus kepada ketahanan pangan tetapi sudah kemandirian pangan.

¹ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Pada prinsipnya tadi begitu mbak, jadi sebelum kita pada masa pak has to kebijakan ini kita juga baru bicara tentang ketahanan pangan, tetapi ketika di eranya pak has to kita sudah mulai bicara kemandirian pangan, itu yang membedakannya disitu.”²

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memprioritaskan pada kemandirian pangan karena Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ingin pangan itu berasal dari Kabupaten Kulon Progo sendiri untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Kulon Progo khususnya. Kalau ketahanan pangan itu pangan itu bisa berasal dari manapun selama masyarakat tercukupi pangannya.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Jadi kan kalau ketahanan pangan kan begini konsepnya, pangan ini berasal dari manapun tidak masalah selama masyarakat tercukupi pangan nya, tetapi

² Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

ketika kita bicara kemandirian pangan itu prioritas, pangan itu harus berasal dari wilayah setempat.”³

Sehingga sampai saat ini produksi beras Kabupaten Kulon Progo sudah lebih dari cukup hingga sudah bisa ekspor ke wilayah lain diluar Kabupaten Kulon Progo, hanya ada beberapa komoditas yang belum ada di Kabupaten Kulon Progo yang masih impor. Kabupaten Kulon Progo juga sudah sampai pada Kemandirian Pangan yang diprioritas dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berharap setelah kemandirian pangan ini Kabupaten Kulon Progo bisa mencapai Kedaulatan Pangan meskipun Kedaulatan pangan harus pada tataran Nasional. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berharap bisa mencapai Kedaulatan Pangan agar Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bisa mengatur dirinya sendiri, mencukupi kebutuhan pangan sampai pada tingkat individu tidak lagi pada tingkat rumah tangga sesuai dengan Undang-undang yang baru.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Dan itu yang terjadi saat ini, jadi produksi beras kita melimpah, bahkan kita bisa ekspor gitu kan ke wilayah lain, hanya memang untuk komoditas – komoditas tertentu kita memang masih impor dan kita berharap juga ketika kemandirian pangan sudah selesai arti jalan terus kita pada kedaulatan pangan, ya meskipun ini kedaulatan pangan tatarannya tidak di kabupaten lah kita

³ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

harus tingkat nasional, artinya apa kedaulatan pangan itu bagaimana pemerintah bisa mengatur dirinya sendiri, mencukupi pangan sampai ketingkat individu, tidak di rumah tangga tapi sampai individu, sesuai UU pangan yang baru, itu konsepnya disitu”⁴

Tabel 3.1
Produksi Beras dan Produksi Setara Beras
Kabupaten Kulon Progo tahun 2009-2013

No	Jenis/Macam	2009	2010	2011	2012	2013
1	Produksi	79.773.00	72.976.00	84.119.00	84.848.00	73.837.00
	Beras (kg)	0	0	0	0	0
2	Kebutuhan	40.554.00	40.338.00	39.353.00	38.655.00	38.085.00
	Beras (kg)	0	0	0	0	0
3	Surplus Beras	39.219.00	32.638.00	44.766.00	46.193.00	34.8000
	(kg)	0	0	0	0	

Sumber : *RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016*

Menurut Bapak Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, Ketahanan Pangan adalah daya mampu sekelompok masyarakat, dalam hal ini masyarakat Kulon Progo bisa mencukupi kebutuhan minimalnya, artinya menurut hitungan tertentu ada zat-zat tertentu yang dibutuhkan oleh mahluk hidup dalam bertahan hidup. Sehingga, kebutuhan minimal yang yaitu kebutuhan perkapita/tahun terpenuhi. Jadi Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan bertugas mensupport dalam memenuhi kebutuhan protein hewani dari unsur ikan dan unsur ternak (daging, telur dan susu).

⁴ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

Sehingga indikator dari kinerja dinas ini adalah capaian angka-angka tertentu pada setiap tahapnya.

Selain, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, ketahanan pangan juga penting menurut masyarakat dan masyarakat sangat mendukung dengan adanya lembaga yang dibentuk pada masa Pemerintahan Bapak Hasto Wardoyo yaitu adanya Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo. Justru masyarakat tidak terima lembaga ini hanya pada tataran aselon 3 karena masyarakat menganggap memang butuh lembaga yang menaungi khusus dalam hal ketahanan pangan. Bahkan, masyarakat Kabupaten Kulon Progo membentuk suatu aliansi dan melakukan audiensi dengan DPRD dan Bupati sampai kepada Biro Hukum Daerah Istimewah Yogyakarta agar lembaga ini tidak hanya pada tataran aselon 3 tetapi aselon 2.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Sebetulnya masyarakat sangat butuh terkait dengan kelembagaan kita, ketika awal-awal lembaga ini di bentuk , justru masyarakat tidak terima ketika hanya ada pada tataran aselon 3, bahkan mereka sudah melakukan membentuk suatu aliansi sudah audiensi dengan DPRD dan bupati , sampai ke biro hukum DIY, artinya masyarakat betul-betul berkeinginan bahwa kelembagaan ini tetap ada, bahkan tidak pada tataran aselon 3 tapi aselon 2 ,jadi masyarakat berkeinginan seperti itu, masyarakat sangat support kepada kami dan kami siap membantu mereka.”⁵

⁵ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

Selain itu, pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan antusias masyarakat dalam hal pangan juga tinggi yaitu dilihat dari banyaknya permintaan dana atau fasilitas kepada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dengan banyak nya pengajuan proposal yang diajukan masyarakat kepada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan ini. Tetapi tidak semua pengajuan proposal tersebut diterima oleh dinas, karena keterbatasan anggaran dan ada pemerataan pembagian dana dan fasilitas untuk setiap daerah dan kelompok. Jadi dinas akan menolak jika sudah memenuhi kouta dalam 1 tahun atau jika sudah merata, karena pemerataan itu yang dikedepankan oleh dinas meskipun permohonan itu banyak.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo :

“Kalau memperhatikan proposal yang terus masuk ke kita, melihat itu masyarakat masih butuh dan masih minat, kita itu kan sampai nolak dengan proposal dan permohonana ke dinas karena memang selain dibatasi satu ketersediaan anggaran, kita juga pemerataan di aspek yang mesti kita kedepankan, jadi pemit itu masih banyak, masih bejibun la”.⁶

⁶ Sudarna, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, *Wawancara*, Kulon Progo, 14 November 2016

2. Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten

Kulon Progo

a. Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Kulon Progo

Kebijakan ketahanan pangan secara nasional yang tercermin dalam Renstra Kementerian Pertanian yang sejalan dengan kebijakan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Kulon Progo diantaranya adalah :

- 1) Dipertahankannya ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kkal/kap/hari, dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari.
- 2) Tercapainya peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi Kecamatan ukuran energi minimal 2.000 kkal/hari dan protein sebesar 52 gram/hari.
- 3) Tercapainya kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) minimal 1,7% per tahun.
- 4) Berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan kronis
- 5) Tercapainya kemandirian pangan melalui pencapaian swasembada berkelanjutan untuk beras dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan daging sapi dan kerbau
- 6) Tercapainya peningkatan distribusi pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat kelompok pendapatan menengah bawah.
- 7) Membaiknya akses rumah tangga golongan miskin terhadap pangan.

- 8) Tercapainya peningkatan cadangan pangan baik cadangan pangan milik pemerintah pusat dan daerah maupun cadangan pangan masyarakat.
- 9) Tercapainya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keamanan pangan.
- 10) Berkembangnya kelembagaan ketahanan pangan yang ada dimasyarakat secara partisipatif sebagai upaya untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam menangani kerawanan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga.

Disamping itu target yang ingin dicapai adalah peningkatan diversifikasi pangan melalui:

- 1) Mempertahankan Konsumsi beras 79,2 kg/kap/tahun, dibarengi peningkatan konsumsi non beras dan non gandum (pangan lokal, umbi-umbian).
- 2) Peningkatan keamanan pangan

Dari aspek pengembangan sumber daya manusia, strategi dan kebijakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan Renstra Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Kehutanan adalah:

- a) Peningkatan peran pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan usaha
- b) Revitalisasi kelembagaan petani dan pembiayaan petani

- c) Peningkatan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan
- d) Perbaiki citra petani agar kembali diminati generasi penerus
- e) Pengembangan sistem penyuluhan pertanian yang efektif

Kebijakan atau program dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dalam hal pangan yaitu :

- 1) Program peningkatan produksi peternakan
- 2) Program peningkatan produksi perikanan
- 3) Program pengolahan pemasaran (nilai tambah)

Yang mempunyai target untuk mencapai produk primer tertentu, seperti capaian produksi ikan, telur, daging dan susu.

Dari hasil penelitian beberapa kebijakan dan program diatas yang telah tercapai dilapangan yaitu berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan kronis, Berkembangnya kelembagaan ketahanan pangan yang ada dimasyarakat secara partisipatif sebagai upaya untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam menangani kerawanan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga dan program dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan. Dibuktikan dengan adanya penurunan desa rawan pangan yang ada di Kabupaten Kulon Progo untuk kebijakan berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan kronis.

Selanjutnya yaitu berkembangnya kelembagaan ketahanan pangan yang ada yaitu dengan awal mula adanya Kantor Ketahanan Pangan dan

Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan, ini sudah merupakan implementasi dari kebijakan tersebut dan diikuti dengan adanya berbagai Kelompok dan Gabungan Kelompok seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), dan lain sebagainya. Upaya Implementasi Kebijakan dan Program dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan juga tercapai dilapangan karena terdapat peralatan bantuan yang diberikan kepada masyarakat khususnya kelompok tani, kelompok ikan dan kelompok ternak dalam bentuk peralatan ataupun benih.

b. Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Kulon Progo

Di Kabupaten Kulon Progo ini sudah mempunyai potensi yang cukup memadai untuk pemenuhan ketahanan pangan. Kulon Progo memiliki luas sawah 10.297 hektar, memiliki indeks pertanaman ditataran teknis di atas 300 sawah dan memiliki pola tanam padi-padi-palawija dari tahun 1984.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Pada inti nya kita melihat dari awal sudah dikatakan cukup dari sisi ketersediaan, cukup, kita mempunyai potensi cukup memadai untuk pemenuhan pangan di Kulon Progo masyarakatnya ya, luas sawah kita itu ada sekitar 10 ribu hektar lebih,10.297 hektar, kalau dihitung indeks pertanaman ditataran teknis, indeks kita sudah ada diatas 300 sawah karena kita punya pola tanam- Kalau pola tanam nya sejak tahun 1985 kalau tidak salah. Atau 84

la ya sudah ada mengenai padi palawija itu setiap tahun kita tanam jadi pengaturan waktunya saja”⁷

Dari banyak program pangan yang ada di Kabupaten Kulon Progo terimplementasi dengan baik. Itulah alasan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bisa mengurangi angka kemiskinan yang tinggi menjadi relatif rendah yaitu dari 34 desa rawan pangan menjadi 9 desa rawan pangan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mempunyai program keunggulan yang pro masyarakat dibandingkan daerah lain seperti Bela-Beli Kulon progo, maka dari itu KP4K adalah tindak lanjut dari jargon Bela-Beli Kulon Progo yaitu “Madhep Mantep Mangan Pangane Dhewe”. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga mempunyai langkah-langkah yang sangat baik selain program dari Pusat dan Provinsi. Pemerintah Kulon Progo saling membangun koordinasi setiap SKPD khususnya hal pangan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo terus koordinasi dengan SKPD lainnya.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Semua program terimplementasi dengan baik, tapi kita punya keunggulan dibandingkan daerah lain, wilayah lain tidak ada, kenapa kita dari 34 desa rawan pangan bisa menjadi 9 desa rawan pangan itu kita punya langkah

⁷ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

langkah yang sangat baik, disamping juga program-program memang dari pusat dari provinsi, kita koordinasi dengan skpd lain.”⁸

Tetapi bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo hal yang paling penting untuk dipikirkan dari terimplementasikannya program pangan ini ialah Distribusi Pangan. Kemudian kebijakan pemerintah yang pro kebijakan pangan. Maka dari itu di Kabupaten Kulon Progo terdapat Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) untuk mensukseskan kebijakan serta program pangan yang ada dalam upaya distribusi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga menginstruksikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) nya untuk mengkonsumsi berasnya petani 10 kg/bulan yang disediakan atau dicukupi oleh Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN). Sehingga, GAPOKTAN sudah mempunyai pasar tetap dan setiap bulan harus butuh 13 ton untuk beras PNS.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Yang penting distribusi pangan yang harus kita pikirkan, dari distribusinya 1, kemudian dari kebijakan pemerintah pro ketahanan pangan makanya gapoktan, jadi kita punya program jadi ada kebijakan dari pemerintah kabupaten agar pns itu mengkonsumsi berasnya petani, setiap pns di haruskan membeli 10 kg beras, jadi kan gapoktan sudah punya pasar kan tidak berpikir terlalu berat.”⁹

⁸ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

⁹ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

Selanjutnya terkait dengan Beras Daerah (RASDA). Beras Raskin sebelumnya tidak jelas asalnya. Tetapi sekarang beras RASDA harus dicukupi dari daerah yang dicukupi dari GAPOKTAN, jadi setiap bulan GAPOKTAN memproduksi beras yang dibutuhkan secara tetap untuk RASDA setiap bulan 750 ton. Jadi petani serta GAPOKTAN sudah mempunyai pasar tetap sehingga banyak uang beredar di Kabupaten Kulon Progo ini dan petani daerah sangat diuntungkan dan aman. Ditambah lagi dengan adanya program Bupati yaitu Bela-Beli Kulon Progo, masyarakat akan sangat diberdayakan dan masyarakat merasa aman secara ekonomi.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Terkait dengan rasda (beras daerah) artinya apa jadi untuk beras raskin yang dulu berasnya itu dulu berasal tidak tau dari mana, dari impor dll, itu harus di cukupi dari gapoktan kita, jadi setiap bulan itu butuh sekitar 750 ton untuk beras pns 13 ton, tapi kan itu sudah pasarnya petani, pasarnya gapoktan, sudah pasti itu, jadi banyak uang beredar di kulon progo, jadi rasda berasnya di cukupi dari daerah , Pns juga beli di gapoktan otomatis kan uang banyak beredar di kita, apalagi pak bupati punya program bela beli kulon progo.”¹⁰

Selain terimplementasikannya kebijakan Ketahanan pangan di bidang Pertanian juga ada di bidang batu dan Kerajinan Batik. Program di bidang batu adalah Batu Andesit, batu yang biasa dibuat paping, sekarang banyak masyarakat menggunakan batu andesit. Kemudian di bidang Kerajinan Batik

¹⁰ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

yaitu Batik Geblek Renteng. Batik Geblek Renteng ini adalah Batik khas Kulon Progo yang sempat tidak dikenal tetapi sekarang Batik ini dipromosikan keluar daerah sehingga pengrajin yang dulu lesu sekarang sudah memulai kembali membatik dan kewalahan untuk menyediakan batik dengan order yang banyak. Ini semua adalah bentuk pemberdayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Kita punya andesit, andesit itu batu ya yang dibuat paping, semua pakai itu sekarang, kemudian ada batik geblek renteng seperti yang saya pakai, itu kan sebagai pemberdayaan, jadi kalau dulu pengrajin itu lesu sekarang kewalahan mereka untuk menyediakan batik ini, banyak order dari mana-mana.”¹¹

3. Kondisi Pangan Kabupaten Kulon Progo Pada Masa Pemerintahan Hasto Wardoyo

a. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanan. Pada tahun 2006 - 2013 terjadi surplus beras dan pangan setara beras di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini menunjukkan

¹¹ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

produksi beras untuk mencukupi kebutuhan beras penduduk masih terjadi surplus yang dapat dikonsumsi penduduk di luar Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 3.2

Produksi Beras dan Produksi Setara Beras

Kabupaten Kulon Progo tahun 2009-2013

No	Jenis/Macam	2009	2010	2011	2012	2013
1	Produksi	79.773.00	72.976.00	84.119.00	84.848.00	73.837.00
	Beras (kg)	0	0	0	0	0
2	Kebutuhan	40.554.00	40.338.00	39.353.00	38.655.00	38.085.00
	Beras (kg)	0	0	0	0	0
3	Surplus Beras	39.219.00	32.638.00	44.766.00	46.193.00	34.8000
	(kg)	0	0	0	0	

Sumber : *RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016*

Indikator yang digunakan dalam ketersediaan pangan, meliputi: tingkat ketersediaan energi dan protein yang ketercapaiannya diukur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan.

Ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Kulon Progo sudah cukup baik seperti beras sudah melimpah dan Ketersediaan Air (Air Kulon Progo) dan di bidang lainnya.

Tabel 3.3
Target dan Realisasi RASDA 2014

No	Nama GAPOKTAN	Realisasi 2014 Per bulan (Ton)							Target 2014
		April	Mei	Juni	Sept	Okt	Nov	Total	
1	Panca Manunggal	60	133,68	76,32	27,33	77,67	15	390	400
2	Makmur Sejahtera	150	157,69	52,31	75	195	45	675	1.200
3	Among Tani	165	130,17	19,83	-	-	-	315	300
4	Sido Maju	45	45	45	45	196,79	72,22	450	300
5	Sari Mulyo	75	60,64	29,36	-	-	-	165	400
6	Sumber Makmur	-	-	-	-	-	-	-	800
Jumlah		495	527,19	222,81	147,33	496,46	133,22	1.995	3600

Sumber : *Proyek Perubahan : Revitalisasi Rasda*

Pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dari sisi ketersediaan selalu tersedia dan kesediaannya selalu meningkat dari target yang ingin dicapai. Itu dikarenakan upaya yang terus dilakukan pemerintah dan masyarakat yaitu tetap melakukan budidaya dan terus memfasilitasi yang baru akan melakukan budidaya ikan agar jadi penambah dari ketersediaan. Jadi selain memberikan fasilitas kepada masyarakat yang baru akan melakukan budidaya ikan, pemerintah juga memberikan fasilitas kepada masyarakat yang sudah melakukan budidaya ikan, yaitu dengan memperluas kolam ikan untuk

menambah produksi. Jadi setiap tahunnya ada peningkatan luas kolam sehingga juga terdapat peningkatan jumlah produksi. Jika jumlah produksi terus meningkat atau naik, maka jumlah total produksi juga naik.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo :

“Kalau sisi kesediaannya kita targetnya hampir selalu meningkat, dengan upaya yang sudah melakukan tetap melakukan yang baru akan itu kita fasilitasi agar nanti jadi penambah, jadian itu luas kolamnya dulu sekian nanti ditambah lagi sekian jadi plus jadi ada nambah produksi, jadi setiap tahunnya ada peningkatan luas budidaya untuk produksi ,jadi jumlah produksi naik, jadi produktivitas totalnya juga naik”¹²

Untuk ketersediaan protein hewani di Kabupaten Kulon Progo masih tersedia pada ikan. Tetapi walaupun ikan tersedia belum tentu masyarakat suka makan ikan.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo :

“Kan kadang-kadang khususnya dengan protein hewani itu kan yang palung banyak adalah ikan, ikan ikan tertentu harganya lebih murah dibandingkan

¹² Sudarna, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, *Wawancara*, Kulon Progo, 14 November 2016

dengan sapi - ternyata walaupun tersedia orang itu belum tentu orang itu mau makan ikan.”¹³

Tabel 3.4
Ketersediaan Ikan Kabupaten Kulon Progotahun 2006-2013

No	Tahun	Ketersediaan Ikan (Kg/kap/th)
1	2006	9,15
2	2007	10,27
3	2008	12,95
4	2009	15,61
5	2010	16,67
6	2011	18,85
7	2012	19,60
8	2013	21,25

Sumber : *Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Kulon Progo, 2013,diolah*

b. Akses Pangan

Di Kabupaten Kulon Progo ini dari sebelum masa kepemimpinan bapak Hasto Wardoyo terdapat permasalahan dalam akses pangan dan masih menjadi permasalahan hingga saat ini. tetapi sekarang permasalahan tersebut bisa teratasi oleh pemerintah karena pemerintah fokus terhadap akses pangan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo ada beberapa permasalahan yang menyebabkan masyarakat tidak bisa mengakses pangan tersebut yaitu :

¹³ Sudarna, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, *Wawancara*, Kulon Progo, 14 November 2016

- 1) Angka kemiskinan tinggi sehingga masyarakat tidak mampu membeli
- 2) Kondisi masyarakat yang cacat
- 3) Keterbatasan barang
- 4) Sarana dan prasarana Infrastruktur yang kurang memadai

Dari beberapa permasalahan di atas berikut uraian beserta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

- a) Angka Kemiskinan Tinggi sehingga masyarakat tidak mampu membeli

Angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo memang menurun jika dibandingkan sebelum masa kepemimpinan Bapak Hasto Wardoyo, tetapi masih relatif tinggi untuk tataran nasional. Maka dari itu ini merupakan salah satu masalah akses pangan yang ada di Kabupaten Kulon Progo yang juga menjadi titik fokus Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, karena masyarakat tidak berdaya atau tidak mampu membeli pangan karena tidak memiliki uang meskipun pangan itu ada.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Akses ini bisa saja masyarakat tidak bisa mengakses karena angka kemiskinan tinggi artinya dia tidak berdaya untuk membeli, itu bisa saja karna

waktu itu sbelum pak hasdo kemiskinan masih sangat relatif tinggi toh meskipun sekarang ini masih relatif tinggi untuk tataran nasional.”¹⁴

Sekarang daya beli masyarakat sudah relatif lebih baik dari sebelum masa kepemimpinan Bapak Hasdo Wardoyo karena Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo dalam segi ekonomi berkomitmen mengurangi Angka Kemiskinan masyarakat. Jika kemiskinan berkurang akses pangan akan lebih mudah.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Kemiskinan berkurang, otomatis kan mengakses pangan kan relatif lebih mudah , tapi karena sekarang daya beli nya relatif lebih baik.”¹⁵

¹⁴ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

¹⁵ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

Tabel 3.5

Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2002-2014

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persen (%)
2002	105,404	93,00	25,10
2003	119,538	91,40	24,35
2004	129,057	94,60	25,11
2005	144,076	104,30	26,80
2006	162,158	106,10	28,39
2007	173,738	103,80	28,61
2008	197,507	97,92	26,85
2009	205,585	89,91	24,65
2010	225,059	90.06	23.15
2011	240,301	92.76	23.62
2012	250,854	93.21	23.31
2013	259,945	86.50	21.39
2014	265,575	84.67	20.64

Sumber: *Susenas 2002-2013, BPS*

b) Kondisi masyarakat yang cacat

Masyarakat yang cacat juga termasuk dalam permasalahan akses pangan karena jika masyarakat itu cacat dia tidak akan bisa mengakses pangan meskipun dia punya uang dan barang itu ada serta, lingkungannya mudah untuk mengakses pangan tetapi tetap akan dibantu oleh orang lain karena tidak bisa membeli sendiri.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Bisa jadi akses ini karena dia cacat, ketika dia cacat dia akan mengakses pangan tidak bisa, mau beli sendiri tidak bisa meskipun dia punya uang tapi tidak bisa”¹⁶

Maka dari itu Pemerintah Kulon Progo langsung turun ke lapangan untuk membantu masyarakat yang cacat, jadi masyarakat yang cacat tidak harus ke pasar, tetapi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sendiri yang akan memberikan pangannya secara langsung kepada masyarakat yang mengalami cacat.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Orang cacat langsung diberi bantuan, tidak harus mereka mengakses ke pasar tetapi kita yang datang ke mereka”¹⁷

¹⁶ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

¹⁷ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

Tabel 3.6

Penyangang Cacat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Penyangang Cacat	6.006	6.173	5.914	4.591	4.546

Sumber : *RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016*

c) Keterbatasan Barang

Kabupaten Kulon Progo memang membuat beranekaragam pangan dan olahannya, tetapi banyaknya kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam, sehingga penyediaan pangan yang ada juga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kulon Progo karena barang yang dibutuhkan masyarakat tidak ada, meskipun masyarakat mampu membeli dan mampu secara fisik untuk mengakses.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Kerana barangnya tidak ada, saya ada uang tapi barangnya tidak ada jadi saya tidak bisa mengakses.”¹⁸

Karena permasalahan di atas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mempunyai program untuk membuat pangan menjadi beranekaragam sehingga terpenuhi kebutuhan masyarakat dan pangan selalu tersedia.

¹⁸ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

d) Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang kurang memadai

Dalam mengakses pangan permasalahan yang ada tidak hanya pada masyarakat saja, tetapi juga dari pemerintah karena belum adanya infrastruktur yang baik untuk masyarakat mengakses pangan seperti, masih ada jalan yang rusak dan rumah masyarakat yang jauh. Hal ini menjadi penting untuk menjadi perhatian pemerintah karena seperti masih adanya jalan yang rusak, masyarakat akan susah mengakses pangannya apalagi masyarakat yang memiliki rumah yang jauh dari tempat akses pangan seperti pasar dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Karena infrastrukturnya, jauh dari tempat tinggal, jalannya tidak baik.”¹⁹

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus berupaya memperbaiki infrastruktur agar masyarakat mudah mengakses pangan sampai pada masyarakat yang tinggal jauh dari tempat akses pangan.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

¹⁹ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

“Infrastruktur diperhatikan - tidak harus mereka mengakses ke pasar tetapi kita yang datang ke mereka”²⁰

c. Penyerapan Pangan

Di Kabupaten Kulon Progo jumlah penduduk semakin banyak atau meningkat maka daya serap pangan juga semakin banyak dan meningkat. Meskipun jumlah penduduk tetapi jumlah konsumsi beras menurun. Hal ini yang membuat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bangga karena penurunan konsumsi beras ini adalah salah satu program Pemerintah. Sebelumnya konsumsi beras pada masyarakat Kulon Progo setiap tahun 83 kg perkapita turun menjadi 79,9 kg perkapita, ini adalah penurunan yang cukup baik. Program penurunan konsumsi beras oleh Pemerintah Kulon Progo dilakukan dengan alasan Produksi beras di Kabupaten Kulon Progo semakin berkurang, banyak lahan yang beralih fungsi dan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Jadi dari sisi penyerapan konsumsi beras semakin berkurang.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Kita punya data gitu ya kalo bicara penyerapan pangan, jumlah penduduk juga semakin banyak dan daya serap pangan juga semakin banyak, cuma yang kami cukup bangga, jadi kan ketika dulu konsumsi beras kita itu 83 Kg perkapita/tahun, setelah mulai kami punya program penurunan konsumsi beras menjadi 79,9 kg perkapita/tahun - Kami memang punya program

²⁰ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

menurunkan konsumsi beras, alasannya produksi kita semakin berkurang, lahan juga beralih fungsi banyak iya toh, otomatisasi produksi semakin berkurang, sementara jumlah penduduk semakin meningkat.”²¹

Meskipun, Pemerintah Kulon Progo menurunkan konsumsi beras tetapi Pemerintah Kulon Progo meningkatkan konsumsi pangan lokal. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya mengembalikan masyarakat pada tradisi jaman dahulu yaitu mengkonsumsi pangan lokal, yaitu dengan cara beralih dari beras ke pangan lokal. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak ingin masyarakat terus ketergantungan karbohidrat hanya pada beras, harus memanfaatkan dengan baik pangan lokal yang ada.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Tetapi kami punya program juga bahwa penurunan konsumsi beras harus diikuti dengan meningkatnya konsumsi pangan lokal, jadi masyarakat itu harus beralih dari beras ke pangan lokal seperti jaman dulu lagi, jadi jangan sampai kita ketergantungan karbohidrat hanya pada beras terus-menerus, tetapi kita punya potensi ketahanan pangan lokal banyak dan itu harus dimanfaatkan dengan baik.”²²

Dari tahun 2015 penyerapan beras di Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan, sementara penyerapan pangan lokal semakin tinggi. Tetapi Pemerintah dalam hal ini Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo khawatir penurunan

²¹ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

²² Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

itu masyarakat beralih ke gandum , mie instan yang produk bahan bakunya berasal dari luar atau impor. Walaupun, program pemerintah meningkatkan daya serap terhadap pangan lokal.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

”Jadi memang dari tahun lalu penyerapan beras menurun tetapi penyerapan pangan lokal semakin tinggi, tetapi jangan sampai juga pengalihan dari 83 ke 79,9 ini beralih ke gandum, mie instan , itu kan semua produk bahan bakunya berasal dari luar , impor semua , itu yang kami agak khawatir jangan jangan larinya kesana, tetapi memang program kami tadi meningkatkan daya serap terhadap pangan lokal.”²³

Jika dari segi konsumsi beras pemerintah Kabupaten Kulon Progo menurunkan angka konsumsinya, tetapi berbeda dengan segi konsumsi ikan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo khususnya Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan justru berupaya meningkatkan konsumsi ikan pada masyarakat Kulon Progo, kerana tingkat penyerapan konsumsi ikan masih rendah dan masih jauh dibandingkan dengan skala Nasional. Tingkat konsumsi makan ikan masyarakat Kabupaten Kulon Progo masih sekitar 22 kg perkapita/tahun, sedangkan Nasional berada di angka 40’an kg perkapita/tahun.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo :

²³ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

“Terkait dengan konsumsi memang kalau ukurannya tingkat kita makan ikan masyarakat kulon progo di bandingkan dengan skala nasional masih jauh - masih sekitar 22 kg perkapita/tahun, itu masih jauh dari nasional yang 40’an kg perkapita/tahun.”²⁴

Jadi untuk penyerapan ikan di Kabupaten Kulon Progo ini tergantung jenisnya. Karena jika ikan dengan nilai tinggi akan menjadi obyek atau di ekspor seperti sama halnya udang yang kualitasnya bagus akan di ekspor. Tetapi ada juga ikan yang kualitasnya untuk konsumsi lokal. Tapi tidak semua, dengan kualitas tertentu juga beredar di pasar lokal. Kalau tingkat konsumsi udang masyarakat Kulon Progo masih rendah, karena masyarakat lebih suka mendapatkan uangnya dari hasil penjualan udang. Jadi sasaran konsumsi masyarakat Kulon Progo adalah ikan hasil budidaya seperti lele, gurami dan nila. Karena ikan hasil budidaya juga tidak kalah nilai gizinya dengan udang. Masyarakat menganggap makan udang itu keren, padahal udang banyak mengandung kolesterol yang tidak baik untuk kesehatan tubuh.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo :

“Jadi kalau ikan itukan jenisnya banyak macam, ada ikan yang kualitasnya untuk konsumsi lokal, ada jenis ikan yang karena nilainya dia menjadi obyek

²⁴ Sudarna, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, *Wawancara*, Kulon Progo, 14 November 2016

atau barang ekspor, nah kalau udang yang kualitasnya bagus itu kebanyakan di ekspor, tapi tidak semua dengan kualitas tertentu juga beredar di pasar lokal, Cuma kalau masyarakat lokal kulon progo yang mengkonsumsi udang masih rendah, itu kalau produk udang masih kecil, dia lebih senang dapat uangnya, namun, untuk lele gurami nila ,dan lainnya ini la yang menjadi sasaran konsumsi kita, dan tidak kalah berbeda nilai gizi, kan yang bedanya hanya nilai gizinya, makan udang wes keren padahal di udang itu ada zat tertentu yang tidak baik untuk kesehatan atau mengandung kolesterol tinggi.”²⁵

Penyebab rendahnya penyerapan konsumsi ikan pada masyarakat Kulon Progo disebabkan karena masih adanya budaya jawa pada umumnya yang mengatakan bahwa makanan tahu dan tempe itu adalah ikan. Ikan tidak hanya berasal dari budidaya kolam atau laut tetapi cukup makan tempe dan tahu itu sudah dianggap makan ikan. Ketidaktahuan atau kurang pengetahuan inilah yang menjadi penyebab kenapa konsumsi ini sangat rendah di masyarakat Kulon Progo terutama orang tua atau lansia.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo :

“Ternyata itu budaya orang jawa pada umumnya tentang, jadi tidak mesti ikan yang berasal di budidaya dari kolam atau tangkapan, aku lauk e iwak tempe, aku lauke e iwak tahu wae, padahal kan tahu dan tempe bukan ikan, itu salah

²⁵ Sudarna, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, *Wawancara*, Kulon Progo, 14 November 2016

kaprahnya. Sehingga masih ada budaya tadi dia belum maindid la tentang ikan”²⁶

Maka dari itu pemerintah Kabupaten Kulon Progo terutama Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan membuat program dan kegiatan untuk mengedukasi masyarakat Kulon Progo agar permasalahan dari kurangnya gemar makan ikan di masyarakat bisa diatasi. Selain itu, Pemerintah juga melatih masyarakat Kulon Progo cara mengelolah ikan agar disenangi terutama anak-anak TK dan SD. Karena target utama dari program edukasi ini adalah anak-anak TK dan SD yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Walaupun capaian targetnya baru bisa dilihat 5 sampai 10 tahun mendatang karena anak-anak TK dan SD adalah generasi penerus. Selain itu, jika diedukasikan kepada orang tua atau lansia akan sia-sia sebab orang tua atau lansia sudah terlanjur apatis untuk gemar makan ikan dan lebih mengikuti budaya yang ada.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo :

“Itu tadi kita mengedukasi dengan ada acara gemar maka ikan dan kita juga melatih pada masyarakat kulon progo itu bagaimana mengelolah ikan itu agar disenangi masyarakat itu terutama masyakat yang masih berumur kecil anak tk sd, karena mengedukasi masyarakat yang sudah tua atau lansia saya kira ndak ada gunanya, karena sudah terlanjur apatis ya, tetapi ketika nanti kita intorduksikan kepada anak anak kecil memang itu target capaian nya tidak

²⁶ Sudarna, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, *Wawancara*, Kulon Progo, 14 November 2016

dalam waktu yang dekat, tapi 5-10 tahun yang akan datang budaya makan ikan itu akan ada”.²⁷

Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan, selain beras, jagung dan kedelai juga ada penyerapan dari buah-buahan yaitu buah durian dan cabe. Tetapi yang lebih banyak yaitu cabe. Dinas Pertanian dan Kehutanan terus berupaya meningkatkan produktivitas dari tanaman buah durian dari mulai penanaman yang baru, pemeliharaan yang berupa memberikan pupuk hingga pendistribusian. Untuk distribusinya itu dijual dengan pemborong melalui ULP jika diatas 200 juta.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Jayeng Purwadi selaku Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias Kabupaten Kulon Progo:

“Durian yang banyak, durian itu ada penanaman, juga ada pemeliharaan yaitu bantuan pupuk, selain itu juga kami menanam yang baru, distribusinya dengan pemborong, kalau diatas 200 juta di borongkan lewat ULP - Cabe lebih besar dan luas.”²⁸

²⁷ Sudarna, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, *Wawancara*, Kulon Progo, 14 November 2016

²⁸ Jayeng Purwadi, Kepala Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias, *Wawancara*, Kulon Progo, 14 November 2016

d. Stabilitas Pangan

Stabilitas Pangan yang ada di Kabupaten Kulon Progo masih terjaga. Selain, upaya dari pemerintah untuk selalu menjaga stabilitas pangan yang ada di Kulon Progo, petani, GAPOKTAN dan KWT juga membantu agar kesediaan pangan tetap stabil, begitu juga stakeholder yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Untuk saat ini stabilitas pangan Kabupaten Kulon Progo masih terjaga karena selain Petani juga ada Gapoktan dan KWT yang membantu membuat stabilitas pangan Kulon Progo tetap terjaga, selain itu banyak stakeholder yang bekerjasama untuk menjaga stabilitas pangan Kabupaten Kulon Progo”.²⁹

c. Status gizi masyarakat

Status gizi di Kabupaten Kulon Progo khususnya dalam hal pangan digambarkan dengan Pola Pangan Harapan (PPH) yang menggambarkan konsumsi keanekaragaman. PPH di Kabupaten Kulon Progo mengalami fluktuasi tetapi semakin membaik. Karena konsumsi masyarakat mulai beranekaragam yang sejalan dengan program Beragam Bergizi Seimbang dan

²⁹ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

Aman (B2SA). Jadi PPH Kabupaten Kulon Progo setiap tahun selalu meningkat dan kerana fluktuasi kadang kondisional juga karena konsumsi masyarakat rendah.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Di gambarkan kalau di kami dengan PPH (Pola Pangan Harapan), jadi PPH kita memang fluktuasi ya tapi, semakin baik sekarang, artinya apa? Artinya apa yang dikonsumsi oleh masyarakat itu mulai beranekaragam, Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), ini adalah program, jadi PPH kita selalu meningkat setiap tahun sebenarnya karena fluktuasi ya kadang kondisional juga.”³⁰

Di Kabupaten Kulon Progo bahkan Daerah Istimewa Yogyakarta konsumsi beras masyarakat rendah. Dari 2000 kg kalori perkapita/hari, seharusnya beras 1000 kg kalori, karena ada program menurunkan konsumsi beras Kabupaten Kulon Progo baru 780 kalori. Harapan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan menurunnya konsumsi beras masyarakat beralih ke non-beras karena karbohidrat tidak hanya berasal dari beras tetapi juga berasal dari ubi, pisang, dan lainnya.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

³⁰ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

“Di Kulon progo bahkan DIY itu kan konsumsi beras rendah , kita dari 2000 kg kalori perkapita/ hari, itu kan dari beras mestinya 1000 kg kalori, kita baru 780 kalori karena tadi kita mempunyai program menurunkan konsumsi beras tadi, harapan kita beralih ke non beras karbohidrat kita masih banyak ada ubi, pisang, gembili, dan macam macam ada banyak sekali potensi kita.”³¹

Dari sisi nutrisi Kabupaten Kulon Progo sudah sangat memadai dari Standar Nasional tetapi belum menunjukkan angka yang ideal yaitu yang seharusnya 2000 kg kalori perkapita/hari, Kabupaten Kulon Progo baru di angka 1850’an.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Kalau sisi nutrisi sebetulnya sudah sangat memadai itu dari standar nasional 2000 kg kalori perkapita/hari kita sudah 1850’an lah itu artinya sudah sangat memadai, cukuplah meskipun belum ideal, karena nilai ideal itu kan tidak mudah untuk didapatkan”³²

Indikator Ketahanan Pangan yang paling mempengaruhi dari beberapa indikator tersebut ialah Akses Pangan dan Ketersediaan Pangan. Akses Pangan

³¹ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

³² Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

berpengaruh dari keberhasilan pangan karena didalamnya juga termasuk sarana dan prasarana berupa fasilitas, kondisi masyarakat dan lain sebagainya. Jika Akses Pangan tidak ada lagi permasalahan maka Penyerapan Pangan akan semakin baik, masyarakat akan semakin mudah mendapatkan pangan dan diimbangi dengan ketersediaan pangan sehingga status gizi masyarakat akan semakin membaik dan perekonomian semakin membaik.

4. Beberapa Kebijakan dan Program Inovasi dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada Masa Pemerintahan Hasto Wardoyo

- a. Slogan/gerakan bela-beli produk lokal : agar terlebih dahulu tercipta pasar (penguasaan pasar sendiri)
- 1) Bela-Beli Kulon Progo Sebagai upaya menjalankan misi Pemerintah Kabupaten Kulonprogo
- 2) Bupati telah menggulirkan slogan “Bela – Beli Kulonprogo” yang kemudian menjadi etos kerja semua SKPD
- 3) “Bela – Beli Kulon Progo” dalam konteks pertanian dan pangan telah dideklarasikan tekad bersama antara Pemerintah, masyarakat Kulon Progo dan pemangku kepentingan lainnya melalui gerakan “Madhep Mantep Mangan Pangane Dhewe” “Madhep Mantep Ngombe Banyune Dhewe”

- 4) Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik tentang potensi Kulon Progo dan memberikan nilai tambah bagi para petani produsen pangan untuk meningkatkan kesejahteraannya
 - b. Agrobisnis dan agro industri dikemas dalam sistem ekonomi kerakyatan yang bisa diakses oleh masyarakat/Pem-Desa
 - 1) Penerapan teknologi Merubah Gula Merah menjadi Gula Semut (gula kristal)
 - a) Teknologi sederhana, bisa dilakukan di rumah tangga membuat Gula punya nilai jual tinggi
 - b) Sertifikasi organik dan sertifikasi indikasi geografis.
 - c) Produksi Gula Semut
 - Sebelum : 60 ton perbulan
 - Setelah : 150 ton perbulan.
 - 2) Produk industri air mineral kemasan, “Air Ku”
 - a) Diproduksi oleh PDAM Tirta Binangun Kulon Progo dan telah memperoleh Sertifikat Standart Nasional Indonesia (SNI) No.01-3553-2006 dan Standar Mutu ISO 9001:2008 dengan kapasitas 2.400 gelas perjam.
 - b) Saat ini sudah memproduksi galon dengan kapasitas 30 galon/jam dan sudah membuat prototype kemasan botol 600 ml.

- 3) Mengganti Raskin Dengan Rasda (beras Daerah)
 - a) (Produk Beras – GAPOKTAN)
 - b) Produksi beras dikemas bagus
 - c) Merk Gapoktan Kulonprogo
 - d) PNS membeli beras petani
 - e) Raskin diadakan dari beras petani lokal via APBD
 - f) Kerjasama dengan Gapoktan dan KUD
 - g) MOU dengan BULOG
- 4) Kopi Khas Puncak Suroloyo
- 5) Teh Kulon Progo

5. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Kebijakan Ketahanan Pangan Pada Kabupaten Kulon Progo

- a. Komunikasi (Strategi) Pemerintah dalam memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasi kebijakan
 - 1) Komunikasi Internal Birokrasi

Suatu kebijakan dan program tidak akan berjalan tanpa adanya komunikasi yang baik di dalam pemerintah. Apalagi di dalam satu struktur organisasi yang akan mengimplentasikan kebijakan atau program tersebut.

Dalam mengimplementasikan program kebijakan ketahanan pangan nya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membangun komunikasi yang sangat baik dan membangun kerjasama yang baik antar SKPD yaitu Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, serta Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian perikanan dan Kehutanan. Ketiga SKPD ini bersama-sama bekerja untuk meningkatkan ketahanan pangan Kabupaten Kulon Progo hingga mencapai kedaulatan pangan. Kerjasama Ketiga Dinas ini dilaksanakan dari program, sosialisasi atau penyuluhan hingga menjalankan program dan kegiatan.

Bentuk kerjasama yang dilakukan antar SKPD ini ialah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dan Dinas Pertanian dan Kehutanan membuat program sementara Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan menjalankan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu, Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan juga mengikuti kegiatan dari kedua dinas tersebut. Dalam hal administratif Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan menginput data yang ada di kedua dinas tersebut dalam hal pangan. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan juga melakukan distribusi hasil olahan pangan yang telah dihasilkan oleh kedua dinas tersebut.

Selain kerjasama antar SKPD, di dalam lingkungan organisasi ketiga SKPD ini pun sangat terbangun komunikasi yang baik sehingga membuat

kinerja lebih mudah. Kerjasama antar SKPD ini tidak tertuang dalam dokumen kecuali ada beberapa di kegiatan, seperti anggota tim dan itu ada Surat Keputusan (SK) nya tertentu yang memang saling berhubungan yang berasal dari SK kepala dinas atau kepala kantor. Tetapi secara MOU tidak ada. Contohnya : jika di Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan itu ada Surat Keputusan Kepala Kantor untuk Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) itu minta bantuan tim di SKPD lain atau seperti program peningkatan produksi pada Dinas Pertanian dan Kehutanan ada Surat Keputusan Kepala Dinas untuk SKPD lain. Selain itu, hubungan SKPD ini sangat harmonis tanpa mencampuri urusan atau tugas pokok masing-masing SKPD. Bentuk kerjasama rill nya antar SKPD ini dari segi Sumber Daya Manusia nya, yang jika sewaktu-waktu saling membutuhkan.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Meskipun tidak tertuang di dalam dokumen tetapi pasti ada bentuk kerjasama mbak, kecuali kita dalam kegiatan tertentu, misalnya kami sebagai anggota tim ditempat tersebut, katakan la misalnya kami di KRPL (kawasan rumah pangan Lestari) itu ya, atau mungkin dinas pertanian terkait dengan misalnya untuk peningkatan produksi, itu kan ada SK (surat Keputusan) misalnya di kami keputusan kepala kantor ketahanan pangan kalau di dinas pertanian mestik keputusan kepala dinas pertanian dan kehutahana - dari personil kami ada yang dimintakan disana atau dari mereka kita minta personilnya kesini, itu bentuk kerjasama rill nya, kalau tertuang dalam dokumen - tetapi di dalam MOU tidak ada, hanya melaksanakan tugas pokok fungsi masing-masing skpd.”³³

³³ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 15 November 2016

Pada pekerjaan sehari-hari Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan adalah sebagai penyuluh yang berkaitan dengan kedua SKPD yang ada yaitu Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dan Dinas Pertanian dan Kehutanan. Karena ada penyuluh pertanian, perikanan dan penyuluh peternakan. Selain itu KP4K juga bertugas dibagian distribusi pangan dan juga olahan pangan lokal. Contohnya : bagaimana mengelolah beras menjadi beras medium atau premium serta pembinaan. Sementara kedua dinas lebih pada hasil produksi. Tetapi untuk pelaksanaannya tetap di GAPOKTAN atau Kelompok Tani.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Tetapi dalam pekerjaan sehari-hari karena jajaran kami itu adalah penyuluh, otomatis kegiatan kita hampir skpd itu ada, kita punya penyuluh pertanian, kita penyuluh perikanan dan ada penyuluh peternakan - Dinas lebih pada produksi atau menghasilkan entah itu peternakan maupun pertanian. Di kantor KP4K ketugasan kami adalah bagian distribusi, kemudian juga olahannya, bagaimana mengelolah beras menjadi medium atau premium, jadi pembinaannya ada di kami, pelaksanaannya tetap di gapoktan atau dikelompok tani.”³⁴

2) Komunikasi Eksternal kepada Masyarakat

Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan atau program tidak terlepas dari dukungan dari masyarakat atau partisipasi dari masyarakat, maka

³⁴ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 15 November 2016

dari itu untuk memperoleh dukungan dari masyarakat agar masyarakat ikut berpartisipasi untuk mensukseskan sebuah kebijakan atau program. Pemerintah harus melakukan komunikasi atau mempunyai strategi agar masyarakat mendukung kebijakan dan program yang akan dijalankan.

Maka dari itu, keberhasilan ketahanan pangan atau lebih tepatnya kemandirian pangan pada Kabupaten Kulon Progo ini Pemerintah Kulon Progo menggunakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Strategi yang digunakan oleh Kabupaten Kulon Progo untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat ialah tetap konsisten pada jadwal atau pola tanam masyarakat yaitu Padi-Padi-Palawija dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo konsisten mendorong regulasi menjadi hal yang terpenting. Regulasi ini salah satunya Peraturan Bupati tentang Tata Tanam Nomor 28 tahun 2015, yang dibuat setiap tahun dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti Petani, GAPOKTAN, Kelompok Tani dan semua stakeholder terlibat disana.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Kita punya pola tanam, sudah intensif sekali sama kita, padi-padi-palawija, jadi kita ada Perbup tentang Ketahanan Pangan. Setiap tahun dibuat, yang membuat dari masyarakat dari Petani, Gapokta, Kelompok tani dan semua stakeholder terlibat disana , pemerintah hanya memfasilitasi saja - Itu yang terpenting adalah regulasi yang kita dorong, regulasi ini salah satunya Peraturan Bupati tentang Tata Tanam, setiap tahun di buat itu.”³⁵

³⁵ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

Tetapi sebelum membuat kesepakatan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan sosialisasi program terlebih dahulu kepada masyarakat. Seperti yang dilakukan di Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan yaitu melakukan sosialisasi dengan penentuan Calon Tani Calon Lokasi (CPCL) pada di kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) , itu kelompok nya berasal dari usulan-usulan dari bawah, kemudian dilakukan CPCL dan dilakukan sosialisasi yang selanjutnya menginformasikan mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan kriteria kelompok seperti apa. Jadi tidak hanya menentukan kelompok secara asal-asalan tanpa sosialisasi dan informasi lapangan dulu, tetapi punya kriteria dan aturan.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Seperti kita memberikan suatu kegiatan kepada kelompok tani, kita mesti melakukan CPCL (Calon Tani Calon Lokasi) kita tentukan , jadi , jelas seperti itu, jadi tidak semata-mata kita copot, atau kita copot langsung kelompok itu tanpa ada sosialisasi. Contoh lain kita selalu ada kegiatan tadi KRPL (kawasan Rumah Pangan Lestari) kita menentukan kelompok ini itu berdasarkan usulan-usulan dari bawah juga, baru kita lakukan CPCL tdi, kemudian lakukan sosialisasi, kemudian kita lakukan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatannya apa saja, kemudian kriteria kelompok seperti apa, itu sosialisasi yang kita lakukan seperti itu. Kita tidak asal mengambil kelompok tanpa ada pemberitahuan lapangan dulu.”³⁶

³⁶ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 15 November 2016

Sebelum menjalankan program dan kegiatan, Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan melakukan sosialisasi tentang manfaat dari mengkonsumsi ikan yang berkaitan dengan nilai gizinya yang ternyata lebih baik dari daging hewan ternak. Seperti mengkonsumsi ikan tidak mengandung lemak jenuh dan daging banyak mengandung lemak jenuh.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo :

“Sosialisasi tentang kemanfaatan dari mengkonsumsi ikan itu nilai gizinya ternyata lebih baik daripada produk daging atau daging dari hewan ternak, karena konon katanya mengkonsumsi ikan tidak mengandung lemak jenuh, daging banyak lemak jenuh.”³⁷

Selain sosialisasi dan komunikasi dengan Kelompok Ikan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat agar program pangan ini dapat terimplementasikan dengan baik yaitu membuat program yang mengajak masyarakat untuk menyenangi makan ikan, karena terkait permasalahan yang ada di Kabupaten Kulon Progo ini daya konsumsi ikannya masih rendah, Jadi ada program gemar ikan. Sehingga

³⁷ Sudarna, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, *Wawancara*, Kulon Progo, 14 November 2016

Pemerintah terus mengedukasi kepada masyarakat agar ada perubahan pola budaya yang semula tidak menyenangi ikan, jadi senang ikan.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo :

“Kita juga mengembangkan program yang mengajak untuk masyarakat mau atau menyenangi makan ikan, ada program gemar ikan - itu upaya kita untuk sembari menyediakan agar tetap dan juga mengedukasi kepada masyarakat agar ada perubahan pola budaya yang semula ngak senang, jadi senang.”³⁸

Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan masyarakat yang ingin meminta bantuan dalam hal benih ataupun fasilitas itu juga ada sosialisasi dilakukan oleh petugas sosialisasi yang dilakukan di Desa. Terlebih sebelum memberikan pengajuan proposal kepada Pemerintah Kabupaten. Setelah mengajukan proposal itu harus diverifikasi terlebih dahulu ditingkat Pemerintah Kecamatan yang dilakukan oleh petugas lapangan dari Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk menentukan layak atau tidak untuk dibantu dan juga mengetahui berapa luasnya, baru kemudian dari kecamatan proposal bisa masuk ke kabupaten dan jika Pemerintah Kabupaten khususnya Dinas Pertanian dan Kehutanan masih meragukan hasil verifikasi maka pihak Dinas

³⁸ Sudarna, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, *Wawancara*, Kulon Progo, 14 November 2016

Pertanian dan Kehutanan akan terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengecek.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Jayeng Purwadi selaku Kepala Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Biasanya ada proposal tetapi tidak mesti sesuai menu yang ada atau kesediaan yang ada, jadi kami sosialisasi dulu ke petugas, dan petugas sosialisasi ke desa. Setelah mengajukan proposal, pemda kecamatan melakukan verifikasi, layak atau tidak dibantu, luasnya berapa, kami punya petugas dilapangan, nanti itu proposalnya masukan di kabupaten, jadi kalau di kabupaten meragukan, kami turun kelapangan untuk mengecek.”³⁹

Selain Regulasi Tata Tanam pada Kabupaten Kulon Progo juga ada regulasi lain karena Pembangunan ketahanan pangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 dirumuskan sebagai usaha mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga, dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu. Kondisi ketahanan pangan dilihat dari 3 aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan,

³⁹ Jayeng Purwadi, Kepala Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias Dinas Pertanian dan Kehutanan, *Wawancara*, Kulon Progo, 14 November 2016

penganekaragaman dan keamanan pangan, dan penanganan kerawanan pangan.

Untuk menjaga Ketahanan Pangan di Kabupaten Kulon Progo telah mengeluarkan pengaturan (regulasi) ketahanan pangan dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan.

Pola tanam Padi-Padi-Palawija adalah kebutuhan masyarakat, masyarakat sudah terbiasa dengan pola tanam Padi-Padi-Palawija. Bila pemerintah mengganti pola tanam, tidak dengan pola tanam Padi-Padi-Palawija akan menjadi penghambat bagi masyarakat karena siklus hama tidak terputus. Ketika pola tanam Padi-Padi-Palawija maka siklus hama akan terputus, contohnya hama padi akan terhenti di proses palawija, jadi ketika menanam padi lagi hama nya akan relatif kecil atau sedikit. Hal ini yang menyebabkan dukungan masyarakat sangat tinggi dan Kabupaten Kulon Progo relatif aman dari hama.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Kemudian kenapa Kulon Progo relatif aman terhadap hama, karna ini kita punya pola tanam padi-padi-palawija, itu adalah salah satu strategi, karena itu sudah menjadi kebutuhan pada masyarakat itu, masyarakat sudah terbiasa dengan padi-padi-palawija, bila keluar dari itu justru akan menghambat bagi mereka sendiri, sudah sangat di butuhkan dari siklus hama yang terputus ketika padi padi palawija jadi, hama padi akan terhenti di proses palawija ini,

jadi nanti padi lagi jadi hamanya relatif kecil atau sedikit, itu yang paling penting disitu, dukungan masyarakat salah satunya disitu.”⁴⁰

Selain itu, Pemerintah Kulon Progo mendorong masyarakat agar lebih aktif lagi meningkatkan pangan lokalnya dengan memfasilitasi masyarakat. Maka dari itu, Pemerintah Kulon Progo mempromosikan dengan baik pangan lokal dan kerajinan lokal yang ada di Kabupaten Kulon Progo ini.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Pemerintah hanya sebatas mengelolah tapi justru dari masyarakat sendiri yang harus lebih aktif, pemerintah hanya memfasilitasi”⁴¹

Dalam mengimplementasikan kebijakan tidak terlepas dari kepala daerah terutama komunikasi yang terjalin antara kepala daerah kepada internal pemerintah dan masyarakat. Maka dari itu selain dari Lembaga Pemerintah, juga ada bentuk komunikasi yang dibangun oleh Bapak Hasto Wardoyo yaitu dengan menghadiri setiap kegiatan yang berkaitan dengan Pangan dari mulai Deklarasi Bela dan Beli Kulon Progo pada tanggal 25 Maret 2013, Deklarasi Mandep Mantep Pangane Dewe pada tanggal 19 Juli 2013, Workshop penyusunan draf kebijakan (policy brief) pada tanggal 19

⁴⁰ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

⁴¹ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

November 2014 hingga Lokakarya Penyusunan Strategi Implementasi Rasda 12-13 maret 2015. Dengan begitu masyarakat bisa berinteraksi secara langsung dan masyarakat bisa merasakan keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan Kebijakan dan Program Pangan.

Dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat mempengaruhi indikator dari ketahanan pangan terutama akses dan stabilitas pangan. Karena dengan adanya komunikasi yang baik maka masyarakat bisa menyampaikan apa permasalahan yang ada dalam mengakses pangan yang juga berdampak kepada stabilitas pangan.

b. Sumber Daya Yang Terlibat dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kulon Progo

1) Sumber Daya Manusia Yang Terlibat Dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kulon Progo

Untuk terimplementasikannya kebijakan publik harus di dukung dengan sumber daya manusia yang banyak. Apalagi kebijakan ketahanan pangan, karena kebijakan pangan merupakan kebijakan yang menjawab persoalan masyarakat yang paling mendasar yaitu perekonomian.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan sudah menyiapkan sumber daya yang akan terlibat dalam kebijakan terutama sumber daya manusia. Pemerintah membuka lebar pintu kerja sama kepada stakeholder

yang bersedia bekerja sama, jadi tidak hanya kerjasama antar pemerintah dan petani sebagai sumber daya manusia nya tapi juga stakeholder lain yang memiliki keahlian dalam bidang pertanian seperti perguruan tinggi, perbankan, asosiasi dan lain-lain, selama itu untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Kulon Progo dan saling menguntungkan untuk kesejahteraan petani Kabupaten Kulon Progo tanpa ada batasan.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Sumber daya manusia nya tidak hanya petani, tapi justru stakeholder siapapun boleh masuk di sini, kita sering kerjasama juga dengan perguruan tinggi, umy, ugm, yang mempunyai basic pertanian itu ketahanan pangan kita libatkan termasuk mercubuana, jadi itu disamping perguruan tinggi juga kita bekerja sama dengan SKPD lain, itu dinas pertanian, dinas kelautan, perikanan, perternakan, kementerian pertanian, kementerian kehutanan dan seterusnya ya, termasuk provinsi juga - Jadi siapapun stakeholdernya silakan selama itu untuk mendukung ketahanan pangan di kami, kami welcome la ya, kita tidak harus ada batasan-batasan tapi selama itu saling menguntungkan khususnya untuk kesejahteraan petani bagi kami, kita tangkap mereka semua jadi jangan sampai ada batasan disitu, jadi siapapun yang ingin untuk bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan petani kami siap untuk membantu, dari mereka juga begitu”⁴²

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo selain menjalankan kebijakan atau program dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga menjalankan program dari Pusat maka Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian

⁴² Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

Perikanan Kehutanan memerlukan banyak stakeholder untuk bekerjasama tidak hanya pemerintah dan petani saja, termasuk juga Perbankan bagian dari mitra kerjasama.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Disamping juga karna program-program pusat banyak didaerah dilaksanakan kita tentu harus bekerjasama dengan pemerintah, disamping masyarakat sendiri tentu saja, swasta juga demikian, dari mulai kita punya asosiasi (pelaku usaha itu) kalo petani kan pelaku utama, banyak lah mitra kita termasuk perbankan juga, itu merupakan bagian dari mitra kerja kami di kantor ketahanan pangan.”⁴³

Jadi tidak hanya kerjasama bentuk terjun ke lapangan saja tetapi juga administrasi dan penghitungan anggarannya juga bekerjasama dengan stakeholder, seperti kerjasama dengan Perguruan tinggi Universitas Gajah Mada (UGM) yaitu Farm Record yaitu pencatatan usaha tani, sharing anggaran, dan membuat software untuk pencatatan usaha tani.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Bentuk kerja sama dengan perguruan tinggi seperti UGM , kita punya kegiatan terkait dengan farm record itu pencatatan usaha tani, sharing anggaran

⁴³ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

kemudian program kami juga iya dengan mereka, bahkan dari ugm di buat software nya untuk pencatatan usaha tani itu.”⁴⁴

Kemudian kerjasama yang langsung ke lapangan yaitu berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang dikirim dari beberapa Perguruan Tinggi. Aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan pangan masyarakat akan disampaikan kepada Perguruan tinggi kemudian pada saat KKN Tematik dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pangan .

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Kami berapa kali kkn tematik yang kita minta mereka yang kirim, jadi yang terpenting apa yang dibutuhkan oleh petani kita catat kita sampaikan ke perguruan tinggi mereka kirim mahasiswanya.”⁴⁵

Selain itu ada Desa Binaan yang salah satunya bekerjasama sama dengan Perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), setiap tahun selalu berkoordinasi dengan Dekan dan tenaga ahli dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) untuk membangun desa. Desa yang dibina oleh mahasiswa-mahasiswi UMY yaitu di Desa Kranggan

⁴⁴ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

⁴⁵ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

Kecamatan Galur. Kemudian ada Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang bekerjasama dengan Fakultas Pertanian UMY.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Kepada umy kami juga punya kerjasama terutama pada fakultas pertaniannya, terkait dengan kawasan rumah pangan lestari , umy punya desa binaan di kulon progo, ada di desa kranggan kec. Galur, setiap tahun kami selalu koordinasi dengan dekan dan tenaga ahli dari umy, untuk membangun desa itu.”⁴⁶

Selain kerjasama dilapangan dan kerjasama di bidang administrasi maupun anggaran, Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo juga bekerjasama di bidang teknologi untuk olahan pangan lokal seperti kerjasama dengan Perguruan Tinggi Mercubuana. Sebelumnya hasil pangan lokal hanya diolah secara tradisional tetapi sekarang sudah menggunakan teknologi agar hasil olahan bervariasi dan mempunyai nilai jual lebih tinggi lagi. Contohnya: geblek dengan rasa yang lebih gurih lagi, slondok dengan berbagai rasa, telo menjadi

⁴⁶ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

roti, brownis dari ketela pohon dan lain-lain, itu ditataran petani khususnya Kelompok Wanita Tani (KWT).

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Dari Mercubuana , itu mereka banyak konsen di pangan olahan, kita punya potensi misalnya ketela pohon, selama ini kan secara tradisiaonal sudah digarap untuk pangan lokal, ntah itu geblek untuk pangan lainnya sondok, tapi ketika ada sentuhan dari universitas teknologinya masuk disana, geblek dengan rasa yang lebih gurih lagi, slondok dengan berbagai rasa, itu lah sentuhan teknologi disana, tidak hanya cuma itu sekarang sudah roti yang berasal dari telo, atau ketela pohon menjadi brownis dan lain lain, itu di tataran petani khususnya kelompok wanita tani (KWT) sudah punya sekarang produk telonya,”⁴⁷

Selain KP4K, Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan juga bekerjasama dengan perguruan tinggi seperti UGM di Fakultas pertanian, kedokteran hewan dan peternakan. Selain itu, Dinas ini juga bekerjasama ke perusahaan swasta. Contohnya : Perbankan, tetapi bentuk kerjasamanya hanya sebatas koordinasi untuk memberikan masukan dan data. Kebijakan yang lainnya tetap pada perusahaan swasta.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo :

“Kalau kita kerjasama nya dengan ugm fakultas perternakan dan kedokteran hewan, kita sangat intens dan dinas pertanian dengan fakultas lain, selama ini

⁴⁷ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

kita mempunyai hubungan baik dengan perguruan tinggi, dan bertahun tahun, misal perternakan itu sudah 3 tahun - kalau ada sumber lain diluar itu biasanya kita hanya koordinatif artinya mereka melakukan sendiri kita hanya di ayer sebagai umpama nya katakanlah ada csr dari suatu perbankan yang akan melibatkan kami,ya kita hanya di libat kan untuk membantu memberikan masukan, katanya sasaran nya dan speknya seperti apa , cara perawatan dan cara budidaya nya, itu kita, tapi kebijakan tetap csr⁷⁴⁸

Pada Dinas Pertanian dan kehutanan bentuk kerjasama yang terjalin ialah kerjasama dengan perguruan tinggi dan TNI. Kerjasama ini dilakukan oleh menteri pertanian dengan melakukan MOU kepada perguruan tinggi dan TNI. Kerjasama melalui MOU dengan TNI berupa membantu swasembada membantu dilapangan, meyerap gabah, mempercepat tanam, dan lainnya. Karena Sumber Daya Manusia yang di butuhkan kurang. MOU yang dilakukan dengan Perguruan tinggi berupa menurunkan mahasiswa-mahasiswa angkatan akhir untuk membantu masyarakat dan pemerintah seperti swasembada padi.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Wazan Mudzakir selaku Kepala Seksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Menteri pertanian MOU dengan TNI, kontrak 2017 Kerjasama dengan TNI, swasembada membantu di lapangan, karena SDM kita kurang di bantu TNI, menyerap gabah, mempercepat tanam, operator alat - Kementrian pertanian

⁴⁸ Sudarna, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, *Wawancara*, Kulon Progo, 14 November 2016

juga pernah MOU dengan perguruan tinggi untuk menurunkan mahasiswa-mahasiswa untuk membantu swasembada padi.”⁴⁹

Selain swasembada mahasiswa yang sudah lulus juga ada kontrak untuk membantu konservasi lahan dan tanaman jahe.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Jayeng Purwadi selaku Kepala Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Mahasiswa yang udah lulus ada kontrak untuk jahe, konservasi lahan juga ada kontrak sama mahasiswa yang baru lulus.”⁵⁰

Di Kabupaten Kulon Progo juga terdapat Kelompok Tani yang di bina Pemerintah khususnya Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo. Cakupan pembinaan kelompok tani diukur dengan jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan dari jumlah seluruh jumlah kelompok tani tahun 2006-2013 sebagai berikut.

⁴⁹ Wazan Mudzakir, Kepala Seksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan, *Wawancara*, Kulon Progo, 14 November 2016

⁵⁰ Jayeng Purwadi, Kepala seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias Dinas Pertanian dan Kehutanan, *Wawancara*, Kulon progo, 14 November 2016

Tabel 3.7

Cakupan Bina Kelompok Tani

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008-2013

No	Uraian	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan Pemda	1.378	1.445	1.538	1.614	1.654	1.702
2	Jumlah kelompok tani	1.378	1.445	1.538	1.614	1.654	1.702
	Cakupan bina kelompok tani (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber : *RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016*

2) Sumber Daya Berupa Fasilitas

Di Kabupaten Kulon Progo untuk mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan yang telah dibuat, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menyiapkan sumber daya yang ada. Jadi, selain sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, ada juga sumber daya lain yang berupa fasilitas atau alat.

Di Kabupaten Kulon Progo pemerintah menyiapkan fasilitas dan memberikan fasilitas itu kepada masyarakat dengan berupa hibah atau bantuan dari permohonan proposal atau lainnya. Diantaranya pada Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian ada pemberian fasilitas untuk budidaya ikan diberikan setiap tahun yaitu berupa peralatan 1 paket budidaya ikan lele, 1

paket budidaya ikan gurami dan ikan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari masyarakat. Selain itu Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan juga memberikan benih ikan dan ternak seperti anak kambing, sapi dan lainnya. Jadi tidak hanya perkataan saja tetapi juga dengan bukti berupa fasilitas, sehingga masyarakat juga berupaya meningkatkan produksi bersama pemerintah.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo :

“Kita memberikan fasilitas masyarakat kelompok-kelompoknya kita memberikan fasilitas budidaya lele, paket budidaya gurami, dan lainnya, sehingga tidak hanya omong tetapi juga ada fasilitas yang sampai kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu benar-benar melakukan upaya bersama dengan pemerintah - Kemudian kita punya target peningkatan populasi lembu atau sapi kita juga ada fasilitas membantu kelompok-kelompok dengan memberi bantuan hibah sapi.”⁵¹

Selain fasilitas dengan paket benih ada juga fasilitas yang berupa perluasan kolam budidaya ikan yang dilakukan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo :

⁵¹ Sudarna, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, *Wawancara*, Kulon Progo, 14 November 2016

“Itu luas kolamnya dulu sekian nanti ditambah lagi sekian jadi plus jadi ada nambah produksi, jadi setiap tahun nya ada peningkatan luas budidaya untuk produksi.”⁵²

Setiap tahun selalu ada fasilitas yang diberikan oleh Dinas Kelautan perikanan dan Peternakan untuk kelompok ternak dan Kelompok Ikan tetapi tidak bisa ditentukan. Tetapi cenderung naik setiap tahunnya. Apalagi Kulon Progo dengan Kemandirian Ekonominya, jadi anggaran setiap tahunnya juga semakin besar.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo :

“Setiap tahun ada cuma jumlah fasilitas itu tidak bisa di ajek/tentukan, cuma kecendrungan naik, dari tahun ke tahun naik, apalagi kulon progo dengan slogan kemandirian ekonomi itu, kemudian keberpihakan kepada masyarakat , bela-beli kulon progo dan seterusnya ini anggaran yang disiapkan itu semakin tahun semakin besar.”⁵³

⁵² Sudarna, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, *Wawancara*, Kulon Progo, 14 November 2016

⁵³ Sudarna, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, *Wawancara*, Kulon Progo, 14 November 2016

Pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan terdapat juga fasilitas pengembangan hewan ternak, misalnya sapi 100 ekor tahun berikutnya 150 dan seterusnya. Kelompok yang dibantu pun berbeda-beda karena tidak boleh pada kelompok yang sama jadi harus merata setiap tahunnya. Misalnya tahun ini kelompok A tahun kedepan kelompok B dan seterusnya. Target sarasannya pun berbeda dan selalu meningkat setiap tahun tapi tetap dalam angka memenuhi sasaran per 5 tahun.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo :

“Fasilitasi pengembangan sapi 100 ekor tahun berikutnya 150 dan seterusnya, jadi program kegiatan 5 tahun itu sama jadi hanya sasaran yang berbeda, jadi yang mau dibantu itu kelompoknya berbeda-beda jadi bantu kelompok itu berturut-turut tidak boleh, harus merata jadi sekarang kelompok a berikut kelompok b kelompok c dan seterusnya, jadi katakanlah dalam 5 tahun akan mensasar 1000 kelompok atau akan membantukan 1000 ekor sapi seumpunya, dibagi 5 tahun, tahun pertama 100 tahun kedua 200, sampai 5 tahun 1000, nah itu sasaran itu yang berbeda beda.”⁵⁴

Tidak berbeda jauh dengan yang ada di Dinas Pertanian dan Kehutanan, dinas ini juga memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa peralatan pengelolah tanah yang berbentuk kaki tiga atau angkong.

⁵⁴ Sudarna, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, *Wawancara*, Kulon Progo, 14 November 2016

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Jayeng Purwadi selaku Kepala Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Jadi selama ini kami juga membantu peralatan, seperti pengelolah tanah juga untuk yang kaki tiga, angkong.”⁵⁵

Tidak hanya fasilitas berupa peralatan, Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan dana yang ada juga memberikan fasilitas kepada petani berupa benih-benih tanaman buah-buahan dan sayur, termasuk pupuk. Benih tanaman buah-buahan yang biasanya diberikan yaitu buah durian dan sayurannya berupa cabe. Selanjutnya jika ada konversi lahan Dinas Pertanian dan kehutanan juga memberikan bibit kepada masyarakat.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Jayeng Purwadi selaku Kepala Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Dinas pertanian itu kadang menyalurkan benih durian, termasuk pupuk, juga memfasilitasi dengan dana yang ada, kadang-kadang ada yang untuk konservasi lahan itu cuma bibit itu aja gak banyak banget, jadi kami dari

⁵⁵ Jayeng Purwadi, Kepala Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias Dinas Pertanian dan Kehutanan, *Wawancara*, Kulon Progo, 14 November 2016

dinas pertanian memfasilitasi petani juga, termasuk benih cabe, selama ini ada terus.”⁵⁶

Penyediaan Fasilitas yang diberikan oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo membantu masyarakat agar terwujudnya ketahanan pangan yaitu terdiri dari beberapa fasilitas. Contohnya, pada kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dilakukan dengan pemberian fasilitas berupa : Pertama, Pendampingan. Kedua, Unit Distribusi itu Finansial yang berupa pemberian uang kepada lembaga dan kemudian untuk cadangan pangan, Pemerintah memberikan uang untuk keperluan membeli gabah dan beras untuk disimpan didalam GAPOKTAN LDPM.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Contoh pada kegiatan LDPM (Lembaga distribusi pangan masyarakat), fasilitas yang kita berikan :1. Pendampingan. 2. Unit distribusi itu finansial (itu uang yang kita berikan kepada mereka). Kemudian untuk cadangan

⁵⁶ Jayeng Purwadi, Kepala Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias Dinas Pertanian dan Kehutanan, *Wawancara*, Kulon Progo, 14 November 2016

pangan, kita berikan uang juga agar mereka belikan gabah atau beras untuk disimpan di dalam gapoktan LDPM ini.”⁵⁷

Kemudian selain fasilitas diatas, Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo juga memberikan fasilitas dalam pegadaan RASDA kepada GAPOKTAN dan Kelompok Tani yaitu berupa : untuk perbaikan RMU terkait dengan gilingan, alat pengering, traktor roda 4 dan roda 2, alat panen. Termasuk kemudahan dalam memperoleh benih dan pupuk dan lain-lainnya. Regulasi yang berupa Peraturan Bupati terkait Tata Tanam juga termasuk fasilitas yang berupa aturan.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Untuk pegadaan beras darah atau RASDA, kita beri fasilitas kepada mereka untuk perbaikan RMU terkait dengan Gilingan, kemudian ada juga kita berikan untuk alat pengering, kemudian untuk gapoktan kita berikan traktor baik beroda 4 maupun roda 2, kemudian ada juga untuk alat panen, itu jugakan bagian dari pada fasilitasi yang diberikan dari pemerintah kepda gapoktan atau kepada kelompok tani, banyak sekali sebetulnya, termasuk kemudahan dalam memperoleh benih, pupuk, itu bagian dari fasilitasi, termasuk salah satunya perbup terkait tata tanam, itu regulasi itu kan fasilitasi. Tetapi terkait yang rill itu seperti yang saya sampaikan tadi.”⁵⁸

⁵⁷ Jayeng Purwadi, Kepala Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias Dinas Pertanian dan Kehutanan, *Wawancara*, Kulon Progo, 14 November 2016

⁵⁸ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

3) Sumber Pendanaan dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kulon Progo

Dana yang digunakan untuk mengimplementasikan Kebijakan dan program ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Kulon Progo sejauh ini keseluruhan didanai oleh pemerintah. Belum ada sumbangan dana dari pihak swasta maupun stakeholder untuk mengimplementasikan kebijakan atau program pangan yang dijalankan. Pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan bentuk kerjasama dengan perusahaan swasta hanya berbentuk dukungan terkait dengan DEM area, tetapi secara keseluruhan tetap di danai oleh pemerintah. Selain itu bentuk kerjasamanya ialah untuk menunjukkan produk pertanaman pertanian yang mereka hasilkan dan ada DEM nya serta dibiayai oleh pemerintah.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Sejauh ini untuk pelaksanaan program dananya masih dari pemerintah, dari pihak swasta ya barangkali hanya support terkait dengan DEM Area, ada itu tapi secara keseluruhan didanai oleh pemerintah, dari swasta itu kita da kerjasama dengan perusahaan apa itu semata-mata hanya untuk menunjukkan produk mereka dalam hasil pertanaman pertaniannya seperti apa, itu ada DEM nya, itu yg pembiayaannya dari pemerintah”⁵⁹

Dalam mengimplementasikan program Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memprioritaskan program untuk menghemat dana dan meningkatkan

⁵⁹ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

produktivitas, meningkatkan kesejahteraan, walaupun dengan dana yang cukup. Jadi setiap kebijakan atau program selalu ada program prioritas untuk ditangani.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Memprioritaskan program yang paling prioritas guna untuk menghemat anggaran, dan sebisa mungkin masyarakat meningkatkan produktivitasnya, meningkatkan kesejahteraannya, jadi kita mempunyai program prioritas dalam menangani setiap kegiatan.”⁶⁰

Tidak berbeda dengan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo, pada Dinas Kelautan Pertanian dan Peternakan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan sumber dana berasal dari Pemerintah yaitu dari sumber dana APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo :

⁶⁰ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

“Kalau kaitannya apa yang tertuang di pelaksanaan kegiatan kita, itu semua adalah sumbernya dari pemerintah dari sumber dana APBD kabupaten, provinsi maupun APBD”⁶¹

Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan sumber pendanaannya juga ada yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Kulon Progo seperti ada CSR dari BMUN Pertamina untuk pembiayaan pupuk dan CSR dari BI.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Jayeng Purwadi selaku Kepala Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Ada CSR itu dari BMUN, Pertamina itu membantu pembiayaan pupuk. Ada dari BI ada CSRnya.”⁶²

Pada pembiayaan beras menurut semuanya pembiayaan dari BI, mempunyai CSR dibina dalam 3 tahun dan hasil berasnya bersertifikat organik dan diakui secara nasional dan sudah masuk di supermarket.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Wazan Mudzaki selaku Kepala Seksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

⁶¹ Sudarna, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, *Wawancara*, Kulon Progo, 14 November 2016

⁶² Jayeng Purwadi, Kepala Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias Dinas Pertanian dan Kehutanan, *Wawancara*, Kulon Progo, 14 November 2016

“Dari BI beras menuh itu klasifikasi nya semuanya BI, kita mencarih semacah mitra, punya csr dalam 3 tahun di bina, lanjut hasilnya beras bersertifikat organi, di akui secara nasional sudah masuk supermarket, dll.”⁶³

Meskipun upaya pemerintah Kabupaten Kulon Progo setiap tahun menambah anggaran untuk Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan, tetapi anggaran masih belum cukup untuk menjalankan program dan kegiatan yang ada sehingga KP4K menjalankan program prioritas guna untuk menghemat anggaran. Berikut realisasi penyerapan belanja KP4K pada tahun 2015.

Realisasi penyerapan anggaran belanja langsung sumber dana dari APBD Kabupaten pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.813.472.067,- (98,07%) dari target belanja langsung sebesar Rp. 1.911.547.005,- .

Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap urusan sebesar Rp.1.180.217.195,- (98,64%) dari target sebesar Rp. 1.196.444.355,- dan realisasi untuk program/kegiatan setiap SKPD sebesar Rp.696.160.588,- (97,35%) dari target sebesar Rp 715.102.650,-

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

⁶³ Wazan Mudzaki, Kepala Seksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan, *Wawancara*, Kulon Progo, 14 November 2016

Tabel 3.8
Rencana Anggaran dan Realisasi Belanja
Terhadap Sasaran Strategis Kantor KP4K Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015

KINERJA					KEUANGAN (Rp)			
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program	Target	Realisasi	%
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Capaian PPH	91	93,10	102,31	Peningkatan Pemberdayaan Penyuluhan	1.077.569.355	1.064.049.775	98,74
					Peningkatan Ketahanan Pangan	118.875.000	116.167.420	97,72
					Jumlah	1.196.444.355	1.180.217.195	98,64

Sumber : *Laporan SKPG KP4K*

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi anggaran mencapai 98,64% dan realisasi kinerja mencapai 102,31% (Efisien).

Hal ini terjadi karena mengoptimalkan sumberdaya aparat yang ada di Kantor KP4K Kabupaten Kulon Progo meliputi Pejabat Fungsional Tertentu sebanyak 79 orang, THL-TBPP sebanyak 62 orang, Pejabat Struktural yang membidangi teknis dilapangan sebanyak 3 orang dan dengan mengoptimalkan sumberdaya lainnya berupa sarana dan prasarana penyuluhan yang dimiliki.

Selanjutnya upaya dalam mengimplementasi kebijakan pangan ini juga dilakukan oleh Bapak Bupati Hasto Wardoyo sebagai Kepala Daerah

yaitu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak hanya melibatkan internal pemerintah tetapi secara langsung melibatkan petani dengan membentuk GAPOKTAN, Kelompok Ikan, Kelompok Ternak dan lainnya. Selain itu, juga mengajak stakeholder yaitu BULOG khususnya untuk beras karena Bupati Hastowo ingin Kabupaten Kulon Progo memproduksi beras sendiri dan memiliki beras premium khas Kulon Progo. Selain itu ada dukungan dari segi finansial atau anggaran dan fasilitasnya. Setiap tahun anggaran ditambah dalam skala prioritas I yaitu untuk program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala Daerah. Dari dukungan sumber daya fasilitasnya setiap tahun meningkat. Dukungan fasilitas pemerintah seperti yang ada pada tabel.

Tabel 3.9

Dukungan Fasilitas Pemerintah

No	Nama Gapoktan	Dukungan Fasilitas Pemerintah		
		2014	2015	2016
1	Panca Manunggal	Rev RMU Rp.195 Jt Dryer Rp.180 Jt		
2	Makmur Sejahtera	Rev RMU Rp.195 Jt		
3	Among Tani		Rev RMU Rp.195 Jt	
4	Sido Maju		Rev RMU Rp.195 Jt	Dryer Rp.187 Jt
5	Sari Mulyo		Rev RMU Rp.195 Jt	
6	Ngesti Raharjo		Rev RMU Rp.195 Jt	

Sumber : *Proposal Proyek Perubahan Revitalisasi Rasda*

Tabel 3.10
 Kerangka Pendanaan Alokasi Belanja Kapasitas Rill Keuangan Daerah
 Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2016

No	Jenis Data	Alokasi					
		2014		2015		2016	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Prioritas I	237.487.829. 024	57,4 3	289.594.066. 405	63,75	272.159.267.9 54	59.1 4

Sumber : DPPKA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014, dan hasil analisis

c. Sikap Birokrasi/Pelaksana (Komitmen) dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Kulon Progo

Sikap birokrasi khususnya dalam komitmen mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan ini sangat tinggi, maka dari itu pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk suatu SKPD yang dikhususkan menangani permasalahan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Kulon Progo dengan membentuk Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan. Itu salah satu keseriusan pemerintah dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan karena pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus disiapkan.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Tentu komitmennya sangat tinggi dalam kegiatan pangan, jadi masyarakat butuh pangan harus kita siapkan, itu komitmen termasuk juga kenapa ada lembaga sendiri juga termasuk komitmen”.⁶⁴

Kemudian keseriusan dan komitmen dari Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan ini sendiri dalam menangani permasalahan ketahanan pangan yaitu menuangkan program bupati ke dalam Renstra yang kemudian akan menjadi program/kegiatan untuk pangan.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Kalau pemerintah kabupaten di jajaran kami, kan banyak program dari bupati, di RPJMD kita tuangkan dalam renstra.”⁶⁵

Pemerintah tidak hanya komitmen kepada pangan pertanian saja, tetapi juga perikanan dan kelautan, karena pangan tidak hanya berasal dari tanaman tetapi juga ternak, ikan dan lain-lainnya.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

⁶⁴ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

⁶⁵ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

“Tidak hanya pangan pertanian, perikanan, kelautan itu spot untuk penyediaan panga, jadi pangan itu jangan diasumsikan selalu berasal dari tanaman, kan bisa ternak ikan, itu yang terpenting disitu.”⁶⁶

Selanjutnya, Sikap Bapak Hasto Wrdoyo terkait dengan komitmen dalam mengimpelentasikan kebijakan pangan yaitu dengan membuat Peraturan Bupati No 28 tahun 2015 tentang Tata Tanam yang dibuat setiap tahun dengan melibatkan masyarakat, menjalain kerjasama dengan BULOG yaitu dengan adanya MoU Bupati dengan Divre DIY tentang pengadaan Rasda pada tanggal 30 desember 2013, adanya SK Bupati KP Nomor 421/A/2015 tentang Pembentukan Tim Pemantau Rasda dan Beras PNS dan Bupati mengusulkan program Rasda diapresiasi Presiden dan Wakil Presiden (13 Februari 2015)

d. Struktur Organisasi

Pada Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo yang menaungi khusus ketahanan pangan ialah Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo. Struktur organisasi lembaga ini masih setingkat aselon 3.

⁶⁶ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Struktur organisasi masih setingkat aselon 3.”⁶⁷

Di Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo ini terdapat banyak SOP dan mereka bekerja berdasarkan SOP yang ada. Beberapa SOP seperti SOP tentang Penumbuhan Kelompok Tani, Beras PNS dan RASDA.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Maman Sugiri selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo :

“Kemudian terkait dengan SOP, kita sudah banyak SOP kita, SOP sudah kita buat terkait langkah-langkah yang harus kita lakukan, jadi semua berdasarkan SOP, kita bekerja harus berdasarkan kesana, tidak mungkin tidak kesana”⁶⁸

Selanjutnya struktur lembaga Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dan Dinas Pertanian dan Kehutanan ada pada tataran tingkat aselon 2. Kedua Dinas ini dalam hal pangan bertugas dalam bidang peningkatan produksi bahan pangan lokal dan KP4K bertugas dibagian

⁶⁷ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

⁶⁸ Maman Sugiri, Kepala KP4K Kulon Progo, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 Oktober 2016

distribusi pangan dan juga olahan pangan lokal. Berkaitan dengan kedua Dinas tersebut KP4K juga bertugas dalam hal penyuluhan.

Indikator dari implementasi kebijakan publik semuanya mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Kulon Progo, tetapi yang paling berpengaruh dari Indikator Implementasi Kebijakan Publik yaitu komunikasi dan komitmen Pemerintah khususnya dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada. Jika terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder sangat mudah untuk mengimplementasikan kebijakan pangan ini dengan mudahnya menjalin kerjasama. begitupun komitmen jika pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan program ini maka masyarakat juga tidak akan banyak yang akan ikut berpartisipasi mensukseskan kebijakan dan program pangan.

Tetapi, Faktor yang paling mempengaruhi yaitu Komunikasi. Komunikasi yang baik antar pemerintah kepada masyarakat maupun stakeholder akan membuat kebijakan atau program berjalan dengan baik. Sikap pemerintah dalam ini komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan programnya akan terlihat dengan adanya komunikasi yang baik dari pemerintah. Selain itu masyarakat juga dengan mudah memberikan masukan kepada pemerintah. Sumber daya yang terlibat juga akan semakin banyak dalam mensukseskan kebijakan pangan karena banyaknya stakeholder yang terlibat dan struktur

pemerintah akan semakin baik dengan adanya komunikasi dengan masyarakat karena adanya dukungan yang kuat dari masyarakat.

6. Kontribusi Ketahanan Pangan

Sektor pertanian menjadi salah satu sektor dominan di Kabupaten Kulon Progo dengan sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB mencapai 23,26% (atas dasar harga berlaku) pada tahun 2006 menjadi 22,87% pada tahun 2013. Berikut tabel jumlah sub sektor tanaman bahan makanan memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB di sektor pertanian pada tahun 2013 sebesar 22,87% yang terdiri dari:

Tabel 3.11

Kontribusi Sub Sektor dalam PDRB di sektor pertanian pada tahun 2013

Sub Sektor	Jumlah (%)
Tanaman bahan makanan	13,25%
Peternakan	5,95%
Kehutanan	1,85%
Perkebunan	1,23%
Perikanan	0,59%

Sumber : *RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2011-2016*

Kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan cenderung berfluktuasi dari tahun 2006 - 2012, kontribusi sektor ini turun pada tahun 2010 sebesar 14,02% yang disebabkan oleh rusaknya saluran irigasi dan mundurnya musim tanam sebagai dampak dari erupsi Merapi. Namun pada tahun 2013

mengalami penurunan terendah pada 5 tahun terakhir menjadi 13,25%, disebabkan antara lain perubahan fungsi lahan pertanian.

Sub sektor peternakan memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap PDRB. Kontribusi sub sektor peternakan fluktuatif dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2010, kontribusi subsektor peternakan adalah sebesar 5,03% dan meningkat lagi menjadi 5,95% pada tahun 2013. Kontribusi sub sektor ini dipengaruhi oleh perkembangan produksi komoditas hasil peternakan baik ternak besar, ternak kecil, maupun unggas.

Sub sektor perkebunan di Kabupaten Kulon Progo memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap PDRB. Pada tahun 2006 kontribusi sektor perkebunan sebesar 1,13% dan meningkat menjadi 1,25% pada tahun 2009. Pada tahun 2011 menurun menjadi 1,14%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan produksi komoditaskomoditas perkebunan sebagai dampak dari erupsi Merapi. Selanjutnya pada tahun 2013 berkontribusi meningkat menjadi 1,23%.

Penyebab rendahnya kontribusi sub sektor perkebunan disebabkan tidak adanya perkebunan skala besar yang ada di Kulon Progo. Pengusahaan komoditas ini sebagian besar dilakukan di tegalan atau pekarangan. Penyumbang terbesar dari perkebunan yakni komoditas tebu, sementara ini komoditas tebu mempunyai kecenderungan trend penurunan produksi karena semakin sempitnya areal pengusahaan tebu.

Tabel 3.12

Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2014

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persen (%)
2011	240,301	92.76	23.62
2012	250,854	93.21	23.31
2013	259,945	86.50	21.39
2014	265,575	84.67	20.64

Sumber: *Susenas 2002-2013, BPS*

Dari tabel angka kemiskinan di atas, ketahanan pangan juga berpengaruh dalam mengatasi angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo terlihat dari Kontribusi Sektor pertanian menjadi salah satu sektor dominan di Kabupaten Kulon Progo dengan sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB mencapai 23,26% pada tahun 2013 karena pertanian merupakan induk dari ketahanan pangan selain bidang perikanan dan peternakan. Selain itu di buktikan dengan berkurangnya desa Rawan Pangan yang ada di Kabupaten Kulon Progo dengan adanya program ketahanan pangan.

Selain di ukur dari indikator diatas dan menurunnya angka kemiskinan, kemajuan ekonomi Kabupaten Kulon progo yang sebagian disebabkan oleh kontribusi dalam bidang pertanian yaitu dapat dilihat dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun dan menurunnya angka pengangguran. Ditambah lagi respon masyarakat yang menyatakan program

pangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo sangat membantu terutama RASKIN dan benih. Meskipun ada beberapa masyarakat yang belum mengetahuinya.

Tabel 3.13
Kapabilitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Kulon Progo 2013-2014

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Pendapatan Asli Daerah	95.991.512.8	130.749.420.9	163.301.311.2	177.967.394.6
		51	52	95	51

Sementara itu tingkat pengangguran di Kabupaten Kulon Progo relatif rendah. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2007-2012 fluktuatif pada kisaran 2,5% 4,5%. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2007 sebesar 4,34 persen, menjadi 3,56 persen pada tahun 2008, sebesar 4,31 persen pada tahun 2009, sebesar 4,18 persen pada tahun 2010, sebesar 2,56 persen pada tahun 2011, dan 3,91 persen pada tahun 2012.

B. Tanggapan masyarakat Kabupaten Kulon Progo terkait dengan Kebijakan dan Program pangan dan Analisis terkait Tanggapan masyarakat

Peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat Kabupaten Kulon Progo mengenai bagaimana tanggapan masyarakat Kabupaten Kulon Progo tentang kebijakan dan program pangan dari Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo. Serta bagaimana dampak yang dirasakan. Berikut hasil wawancara peneliti kepada beberapa masyarakat asli Kulon Progo.

1. Dari hasil wawancara pertama yang dilakukan peneliti kepada masyarakat asli Kulon Progo yang bernama Anto yang bekerja sebagai petani dan berusia 26.

Menurut bapak Anto dari segi kelayakan konsumsi produk kulon progo itu layak konsumsi karena orang tuanya juga mengkonsumsi salah satu produk pangan kulon progo yaitu Raskin dan relatif murah dan hampir setiap Kepala Keluarga mendapatkan RASKIN. Tetapi kalau untuk konsumsi jenis pangan olahan lainnya belum ada di dusun nya dan belum ada efek yang sangat dirasakan. Selain itu dari segi pertanian sangat keberatan jika pupuk dialihkan dari pupuk briket (butir) ke pupuk tabur yang berasal dari subsidi pemerintah, karena hasilnya yang kurang memuaskan dan boros.

Berikut kutipan hasil wawancara :

“Ya kalau saya sendiri itu gumaya, rumah tangga belum lama, jadi ya biasa-biasa saja mbak, kayaknya belum ada efek yang begitu besar- mengenai produk lain, kalau saya itu tidak pernah kuliner seperti eh mbak (ngak menarik sudah biasa), hampir setiap kk dapat raskin- itu bayar sangat murah sekali mungkin cuma untuk biaya distribusi- bantuan pupuk melalui kelompok tani, tapi sekarang kan tidak boleh memakai briket (pupuk butiran) toh, kalau menurut saya kalau tidak memakai briket pupuknya itu habis lebih banyak dan sepertinya hasilnya juga kurang memuaskan, pupuknya Cuma pupuk sebar, yang ada Cuma beras, yang lainnya belum ada di daerah ini.”⁶⁹

⁶⁹ Anto, Petani, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 November 2016

2. Dari hasil wawancara kedua yang dilakukan peneliti kepada masyarakat asli Kulon Progo yang bernama Ibu Wasri yang bekerja sebagai petani

Menurut Ibu Wasri, Ibu wasri tidak mengetahui mengenai RASDA dan RASKIN yang ada di Kabupeten Kulon progo.

Berikut kutipan hasil wawancara :

“Ngak tau e saya, ngak tau mengenai beras rasda sama raskin”⁷⁰

3. Dari hasil wawancara Ketiga yang dilakukan peneliti kepada masyarakat asli Kulon Progo yang bernama Bapak Teguh Raharjo yang bekerja sebagai petani dan berusia 52 Tahun.

Menurut bapak Teguh dengan adanya program bela-beli ini masyarakat tidak perlu lagi membeli ke tempat lain apa yang dibutuhkan. Kulon Progo sudah mempunyai kebutuhan tersebut seperti sawi, terong dan cabe dan bisa menanam sendiri. Kulon Progo juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Contohnya mempunyai batu alam, hanya saja masyarakat belum tahu apa manfaatnya. Pada saat adanya bandara baru produk Kulon Progo bisa di pasarkan disana.

Dari segi konsumsi produk bela-beli bapak teguh mengkonsumsi air Kulon Progo dan menggunakan batik Renteng. Tetapi untuk RASKIN rasanya kurang enak di konsumsi dan berasnya sudah berwarna kuning-kuning, sehingga kurang layak untuk di konsumsi, seharusnya RASKIN itu layak

⁷⁰ Wasri, Petani, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 November 2016

dikonsumsi dan enak dimakan, kalau tidak layak dikonsumsi akan membuat masyarakat menjadi tidak sehat. Pada saat pembagian beras ada yang melakukan pungutan liar, yang seharusnya 1 karung 24.000 menjadi 29.000 dengan biaya di pungut 5000. Sementara pemerintah tidak mengetahuinya.

Dari sisi Pertanian, Bibit benih yang di berikan pemerintah kurang bagus dari segi kualitasnya sehingga hasilnya kurang memuaskan, memang pemberian bibit secara gratis tapi dalam kondisi kualitas yang kurang baik. Sehingga masyarakat membeli bibit sendiri dari boyolali dan bantul.

Berikut kutipan hasil wawancara :

“Program bela beli ini apa adanya lah, tidak perlu beli kesana, memang yang ada di produksi baik cukuplah untuk di makan, ada gula merah, ada sawi terong cabe , tanam sendiri bisa lah, beli itu katanya pak hasdo itu apa ya, kalau ambil itu tidak usah beli di daerah lain la, contoh batu alam itu kulon progo itu bisa Cuma belum tau manfaatnya. Mengonsumsi air aquaria, selain itu juga kain batik renteng, bermanfaat sekali ini nanti akan mengengjot perekonomian kulon progo itu adalah pengadaan bandara, jadi produk produk apalah yang dikulon progo bisa di pasarkan. Beras raskin itu kalau di konsumsi rasanya kurang enak, sudah kuning kuning itu loh, terus ada pungli- pungutan liar, seharusnya raskin itu layak dikonsumsi dan enak dimakan, ya kalau layak enak dimakan, kalau tidak kan kan tidak sehat juga untuk badan, seharusnya di jual dan di belikan yang enak konsumsi, daerah karonga sudah masuk pengadilan gara-gara pungli, perkarung itu kan Cuma 24 ribu, itu di pungut biaya 5 ribu, itu untuk pengambilan karcis, pemerintah baru mengetahui, bibit benih dari pemerintah tidak seperti ini mbak baiknya, kurang bagus, kualitasnya kurang bagus, hasilnya kurang memuaskan, bibitnya tu memang gratis , dulu banyak tapi kurang begitu bagus, hasilnya kurang memuaskan, jadi beli sendiri, dari boyolali 60 ribu, dari bantul dari 55.”⁷¹

⁷¹ Teguh, Petani, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 November 2016

4. Dari hasil wawancara Keempat yang dilakukan peneliti kepada masyarakat asli Kulon Progo yang bernama Ibu Rostina yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan berusia 53 Tahun.

Menurut Ibu Rustina mengenai produk pangan lokal itu sudah ada air kulon progo yang yang telah dikonsumsi ketika ada yang menikah dan meninggal. Dan untuk RASKIN jika berasnya enak makan akan di makan untuk konsumsi sendiri, tetapi kalau tidak enak dijual lagi kepada masyarakat lain. Di RT ini hanya 5-6 orang yang mendapatkan RASKIN. Pembagian RASKIN dilakukan oleh pengurusnya dengan bayar 3000 biaya jalan, sedangkan harga berasnya 16.000 per 10 kg/bulan.

Berikut kutipan hasil wawancara :

“Airku udah sampai sini, lagi ada pengantin, orang meninggal, itu dikasih air aquaku, beras kalau bagus dimakan, kalau tidak dijual, Cuma berapa orang disini 5-6 orang, dicatat dari rt, kekelurahan. 10 kg sebulan, pembagiannya di bagi sama pengurusnya, byar 3 ribu untuk ongkos jalan, berasnya 16.000 sama ongkos 3 ribu jadi 19.000.”⁷²

⁷² Rostina, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 November 2016

5. Dari hasil wawancara Kelima yang dilakukan peneliti kepada masyarakat asli Kulon Progo yang bernama Bapak Sumadi yang bekerja sebagai Petani dan berusia 40 Tahun.

Menurut Bapak Sumadi dari segi konsumsi produk pangan lokal di Kabupaten Kulon Progo belum konsumsi , hanya kadang-kadang beli barang pangan tapi jarang dan kalau RASKIN bapak sumadi tidak mendapatkannya. Pak sumadi juga termasuk menjadi bagian Kelompok Tani juga, tapi tahun ini beli benih sendiri karena tidak mendapatkan bantuan, kalau tahun kemarin masih ada bantuan dari Pemerintah. Menurut bapak Sumadi bantuan yang diberikan pemerintah itu kualitasnya berbeda-beda. Seperti tahun kemarin bantuannya dengan kualitas kurang bagus, 2 tahun sebelumnya dengan kualitas bagus. Walaupun sebenarnya sangat bermanfaat sekali bantuan yang diberikan tetapi kualitas bantuan itu kurang bagus. Bantuan yang didapatkan dari pemerintah berupa benih jagung dan benih padi yaitu cierang.

Berikut kutipan hasil wawancara :

“Belum mengkonsumsi produk olahan bela beli kulon progo, Kalau beras saya ngak dapat, kadang beli barang pangan tpi jarang-jarang. Iya jadi anggota kelompok tani, tahun ini ngak ada bantuan eh, tahun ini beli sendiri, tahun kemarin ada, tapi bantuannya jelek, ngak mesti, 2 tahun kmren bagus, tahun berikutnya jelek, tahun ini ngak ada bantuin, raskin di data sama pak dukuh, Adanya bantuan bermanfaat sekali, sayangnya bantuan itu ngak bagus dari segi kualitas, yang kemaren jagung dapet, terus benih padi itu cierang, peternakan saya ngak ikut, ada bantuan tapi saya ngak ikut, kalau berminta boleh ikut.”⁷³

⁷³ Sumadi, Petani, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 November 2016

6. Dari hasil wawancara Keenam yang dilakukan peneliti kepada masyarakat asli Kulon Progo yang bernama Bapak Sumarjo yang bekerja sebagai Petani dan berusia 56 Tahun.

Menurut Bapak Sumarjo dengan adanya RASKIN sangat bermanfaat, tapi benih yang diberikan kepada kelompok tani itu kualitasnya kurang bagus. Benih jagung yang diberikan ada yang pendek, ada yang tinggi dan putih-putih dan tidak berbuah sehingga kalau di tanam hasilnya tidak memuaskan dan di beberapa tanah tidak bisa ditanami benih jagung tersebut. Benih jagung yang diberikan yaitu jenis jagung NK13 dan Tongkol 2, Tetapi berbeda dengan benih padi yaitu benih cierang itu cocok untuk ditanam. Jika benih bantuan kualitasnya kurang bagus maka petani membeli sendiri bibit dari jawa timur.

Berikut kutipan hasil wawancara :

“Saya dapat raskin, benar-benar bermanfaat, iya kelompok tani, benih beli, kalo kelompok tani tu dulu ada bantuan tapi di tanam disini ngak cocok, itu ada yang pendek, ada yang tinggi ada yang putih-putih ngak berbuah, kualitas benihnya jelek. Benihnya padi cierang, jagung NK13 sama tongkol 2, setiap tahun, kalau padi cocok, kalau jagung ngak cocok, kalau ada yang petani itu brambang, kalau bibitnya jelek, beli sendiri dari jawa timur.”⁷⁴

⁷⁴ Sumarjo, Petani, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 November 2016

7. Dari hasil wawancara Ketujuh yang dilakukan peneliti kepada masyarakat asli Kulon Progo yang bernama Bapak Aris yang bekerja sebagai Petani dan berusia 39 Tahun.

Menurut bapak Aris untuk RASKIN yang mendapatkannya adalah orang yang tidak mampu dan itu bermanfaat bagi masyarakat. Bantuan yang didapatkan untuk pertanian berupa benih padi dan peralatan bajak sawah untuk kelompok tani. Masing-masing kelompok tani mendapat 2 peralatan bajak sawah. Benih yang didapatkan berkualitas bagus. Untuk peternakan akan diberikan itik tapi belum di bagi.

Berikut kutipan hasil wawancara :

“Yang dapat itu yang ngak punya punya, kalau di tempat saya itu dapat, ke masyarakat umunya bermanfaat, kelompok tani, bantuan benih padi, peralatan bajak sawah, ikut kelompok ternak, belum dikasih, katanya mau dikasih itik, kalau benih padinya bagus, daerah cangaan itu benih bantuan semua dari pemerintah, pupuk sama benih. 1 kelompok kalo ngak salah dapat 2.”⁷⁵

⁷⁵ Aris, Petani, *Wawancara*, Kulon Progo, 20 November 2016